



mediakebijakan

BANGUN FONDASI

ORGANISASI



Hey.. Sobat Cendekia

yuk buat video pendek
edukatif seputar kebijakan
publik..

Durasi Video Max. 90 Detik

Syarat dan ketentuan:

Topik yang dibahas seputar kebijakan di
bidang pemerintahan dalam negeri.

Konten video berdasarkan hasil referensi
dari situs web **BSKDN Kemendagri** atau
Youtube BSKDN Kemendagri.

Video bisa dikirim melalui direct
message (DM) Instagram
@bskdn.kemendagri. Wajib follow akun
Instagram **@bskdn.kemendagri** sebelum
mengirimkan video Anda. Satu
pemenang akan mendapat
merchandise menarik dari Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri.



Follow :   BSKDN Kemendagri   @bskdn.kemendagri  @BSKDNKemendagri

BANGUN FONDASI ORGANISASI

Lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Departemen Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) resmi berdiri. Keputusan bertarih 26 Mei 1975 tersebut juga menjelaskan fungsi Badan Litbang di antaranya merumuskan rencana, mengolah dan mengoordinasikan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan penelitian serta pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri). Sejak saat itu, Badan Litbang terus berkiprah dalam mengawal kebijakan berbasis riset sebelum bertransformasi menjadi Badan Startegi Kebijakan Dalam Negeri di tahun 2021.

Sobat Cendekia, Media Kebijakan edisi kali ini akan mengajak Anda untuk melihat riwayat singkat dari Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di dalamnya kami akan menyuguhkan informasi mengenai hasil kinerja organisasi di awal pendiriannya. Selain itu, kami akan memotret sepak terjang dari beberapa mantan Kepala Badan Litbang dalam merintis lembaga riset ini

sehingga mampu terus menunjukkan tajinya. Semuanya akan kami sajikan di rubrik laporan utama.

Bagian lainnya tentu tidak kalah menarik. Anda dapat mengetahui apa saja aktivitas terbaru dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melalui rubrik Jendela. Atau bilamana pembaca sekalian ingin merencanakan vakansi di akhir tahun, kami menyajikan informasi mengenai wisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rubrik Wisata. Beragam ide segar ihwal isu terkni juga tersedia dalam rubrik Opini dan Statistic Corner.

Pelbagai rubrik yang terangkum dalam Media Kebijakan edisi kali ini semoga dapat memperkaya khasanah pembaca sekalian. Selamat membaca Sobat Cendekia.



Kurniasih
Sekretaris BSKDN Kemendagri



BINA PRAJA PRESS:

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbang.kemendagri.go.id
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

media kebijakan

SUMBER INFORMASI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

VOLUME 1 NOMOR 6 TAHUN 2023

PELINDUNG

MENTERI DALAM NEGERI

PENANGGUNG JAWAB

YUSHARTO HUNTOYUNGO

PEMIMPIN REDAKSI

KURNIASIH

REDAKTUR PELAKSANA

AJI NUR CAHYO

REDAKTUR

AFERI SYAMSIDAR

AKBAR ALI

HERU TJAHYONO

TIHAR MARPAUNG

PENYUNTING

FRISCA NATALIA

PELIPUTAN

NOVI FUJI ASTUTI

PENATA LETAK

FAJAR HARAMUKTI

ILUSTRASI COVER

FAJAR HARAMUKTI

Diterbitkan oleh:



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.go.id

Frekuensi terbitan : 2 bulanan
Nomor ISSN : 2962-0740 (media cetak)

Keterangan : Kategori sosial
SK No. 29620740/II.7.4/SK.ISSN/01/2023

mulai edisi Vol. 1, No. 6, Januari 2023



Bangun Kolaborasi Riset,
BKSDN Minta Praja IPDN Akti Hasilkan
Penelitian Berkualitas

4



32



jendela BSKDN

Sempurnakan IPKD, Kepala BSKDN Realisasi APBD
Harus Berdampak ke Masyarakat

6



aktivitas

BSKDN Gelar Workshop
Jurnalistik, Tingkatkan
Kemampuan Penyusunan
Jurnalistik Kebijakan

12



aktivitas

Sambut Lebaran, BSKDN Kemendagri Bagikan Sembako
kepada Pegawai dan Anak Yatim

16

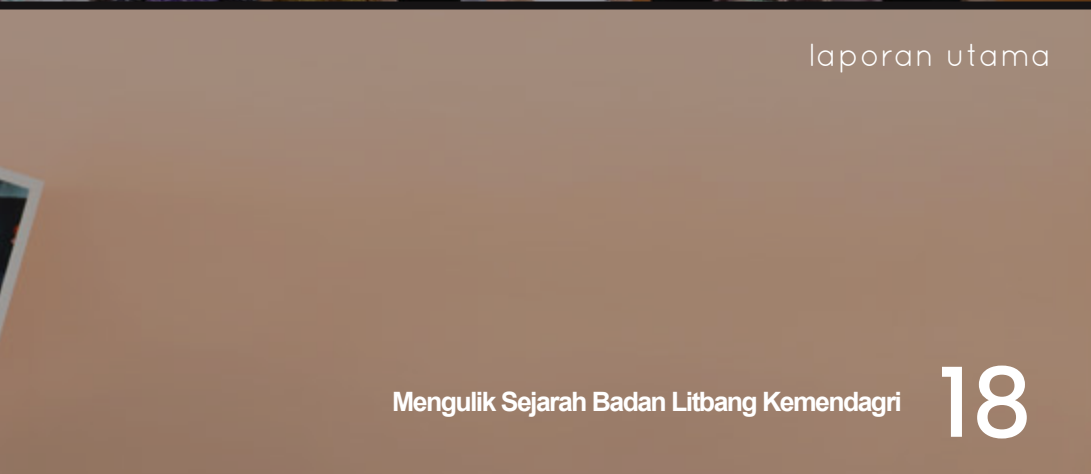


laporan utama

1 Ideation
2 Research and Development
definiskan, menganalisis masalah, pengembangan menghasilkan potensi, nilai peluang

Perkuat Binwas
lewat Penerapan
Fungsi & tugas

24



laporan utama

Mengulik Sejarah Badan Litbang Kemendagri

18



lebih dekat

Kaban dari Masa ke Masa

36



resensi film

Berbalas Kejam

52

BANGUN KOLABORASI RISET, BSKDN Minta Praja IPDN Aktif Hasilkan Penelitian Berkualitas

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun kolaborasi riset bersama Intitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dalam kolaborasi tersebut Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo meminta praja IPDN regional Kalimantan Barat (Kalbar) untuk turut aktif menghasilkan penelitian berkualitas.

Pesan itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kuliah umum bertema “Sosialisasi Peran dan Fungsi BSKDN dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah” bertempat di aula IPDN regional Kalbar pada Selasa, 4 April 2023.

Lebih lanjut Yusharto mengungkapkan, BSKDN sebagai lembaga yang baru bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomen-

si strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjalankan tugas tersebut, BSKDN tidak melakukannya sendiri namun membangun kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk IPDN.

Yusharto berharap tidak hanya dosen yang menghasilkan riset untuk direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan kebijakan. Akan tetapi, praja IPDN juga aktif melakukan penelitian sejak duduk di bangku kuliah.

“Kami berharap banyak dengan hasil-hasil penelitian tidak hanya dari dosen tetapi juga mahasiswanya. Paling tidak adik-adik termotivasi untuk menulis proposal yang berkualitas yang nantinya akan diapresiasi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Membiasakan diri terlibat aktif dalam penelitian akan



Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo menjadi narasumber dalam kuliah umum di kampus IPDN regional Kalimantan Barat yang berlangsung pada Selasa, 4 April 2023, di Aula IPDN Regional Kalimantan Barat, Mempawah.

membuat praja IPDN terbiasa dengan urusan pemerintahan jauh sebelum mereka ditempatkan dalam instansi pemerintahan. Yusharto menambahkan, nantinya purna praja IPDN harus membekali diri dengan pengetahuan yang mumpuni mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Minimal (praja IPDN) mau menulis setidaknya dua variabel dalam satu tulisan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) umpamnya sebagai bentuk partisipasi praja IPDN supaya lebih awal terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pemerintahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan sejumlah indeks yang dimiliki BSKDN. Harapannya indeks tersebut dapat dipelajari lebih dalam oleh praja IPDN

sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan terutama di tingkat daerah.

Dia melanjutkan, indeks yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

“Indeks-indeks ini untuk mengukur seluruh kinerja pemerintahan daerah untuk bisa mengetahui daerah mana yang sudah bekerja maksimal dan daerah mana yang masih membutuhkan intervensi pemerintah pusat,” pungkasnya.

• Novi



Sempurnakan IPKD, Kepala BSKDN: Realisasi APBD Harus Berdampak ke Masyarakat

Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya menyangkut soal realisasi. Lebih dari itu, penggunaan APBD harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pesan itu ditegaskan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntounggo saat memimpin Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Aula BSKDN pada Jumat, 31 Maret 2023.

Dalam arahnya Yusharto mengatakan, ke depan IPKD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun APBD yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dirinya mengimbau APBD yang disusun tidak hanya mementingkan realisasi, tetapi juga harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

“Ya kita coba dorong dengan pengukuran yang tepat agar bisa jadi guidance bagi daerah untuk melakukan proses perencanaan sampai dengan merealisasikan anggaran itu dengan cara-cara yang benar, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar realisasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, BSKDN terus berupaya menyempurnakan IPKD dengan merevisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD. Yusharto mengatakan, revisi ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat memotret kualitas tata kelola keuangan di daerah.

Dengan begitu, dia berharap, hasil pengukuran IPKD dapat memacu daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangannya, sehingga kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat bisa lekas terwujud.

Sementara itu, terkait penyempurnaan pengukuran IPKD,



Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Jumat, 31 Maret 2023, di Aula BSKDN Kemendagri.

Yusharto meyakini dapat segera merampungkannya mengingat indeks ini telah mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, seperti *United States Agency for International Development* (USAID) dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT).

“Kita melakukan kerja sama dengan mereka (USAID ERAT) untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk bisa memantau terus dan melakukan penyempurnaan terhadap instrumen maupun peraturan yang mengatur tentang IPKD,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, secara garis besar substansi yang akan direvisi dalam Permendagri tersebut yakni nomenklatur instansi Litbang yang beralih menjadi BSKDN. Perubahan lainnya yaitu sumber data IPKD yang berasal dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi dan kabupaten/kota.

Revisi lainnya mencakup Dimensi Pengelolaan Anggaran Belanja dalam APBD yang perlu ditambahkan mengenai skema pengukuran alokasi anggaran untuk daerah di Papua, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Revisi juga perlu dilakukan pada Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penyajian dokumen pengelolaan keuangan daerah oleh Pemda melalui website resmi masing-masing. Terakhir, revisi terkait Klaster Kemampuan Keuangan Daerah yang perlu disesuaikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan meliputi kategori Sangat tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah.

• Novi

KEJAR TARGET

30 RIBU INOVASI

PADA TAHUN 2023,

Kepala BSKDN Ajak Jajarannya Dekati Pemda

Pada penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) tahun 2022, partisipasi pemerintah daerah (Pemda) dinilai meningkat cukup signifikan. IGA merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi daerah terinovatif. Pada tahun 2022, sebanyak 510 Pemda melaporkan inovasinya dengan total inovasi sebanyak 26.900 inovasi. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntouyungo saat memberi arahan dalam acara Penajaman Program dan Kegiatan di Lingkungan BSKDN. Acara tersebut ber-

langsung di Aula BSKDN pada Senin, 20 Maret 2023.

Lebih lanjut, Yusharto berharap, pada tahun 2023 partisipasi Pemda dalam melaporkan inovasi terus meningkat. Dirinya optimis pihaknya dapat mendorong Pemda untuk segera melaporkan inovasinya dengan tertib. Dia menambahkan, inovasi yang terlapor pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 30.000 inovasi. Guna meningkatkan jumlah inovasi yang terlapor tersebut, dia meminta jajarannya untuk melakukan pendekatan terhadap Pemda terutama kepada daerah yang belum melaporkan inovasinya.

“Masih terdapat sekitar 31 daerah yang tidak melaporkan inovasi. Di tahun 2023 di awal-awal ini, ayo kita dekati daerah-daerah tersebut sehingga proporsi daerah yang



Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoung memberi arahan dalam acara Penajaman Program dan Kegiatan di Lingkungan BSKDN. Acara tersebut berlangsung pada Senin, 20 Maret 2023, di Aula BSKDN Kemendagri, Jakarta.

melaporkan inovasi di tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022,” jelasnya.

Dia juga mengimbau kepada jajarannya agar mengapresiasi Pemda yang melaporkan inovasinya pertama kali. Menurutnya, apresiasi tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemda untuk berlomba-lomba melaporkan inovasinya lebih dahulu.

“Mari kita tantang bersama terutama bagi daerah otonom baru di Papua (untuk melaporkan inovasinya), kalau bisa menjadi daerah yang pertama kali melaporkan inovasinya di tahun 2023,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto menjelaskan, untuk mendorong peningkatan jumlah inovasi daerah, pihaknya ten-

gah melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak. Hal itu salah satunya kerja sama dalam pengembangan Jejaring Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kerja sama tersebut memungkinkan Pemda dapat saling berbagi informasi mengenai inovasi pelayanan publik.

“Kita akan saling berbagi data meng- interoperability -kan aplikasi yang kita miliki dengan aplikasi yang ada di LAN dan Kementerian PANRB dengan dukungan pembiayaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” pungkasnya.

• **Novi**

KEPALA BSKDN IMBAU DESA Lakukan Pembangunan Berbasis Potensi

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau desa melakukan pembangunan berbasis potensi. Pesan itu, disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberikan arahan dalam acara Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara daring dan luring dari Aula BSKDN pada Selasa, 28 Februari 2023.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, pelaksanaan otonomi desa salah satunya bertujuan untuk menciptakan self governing community atau kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, otonomi desa memberikan kesempatan bagi desa untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

“Otonomi desa seharusnya mampu mendorong pemerintahan dan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan berbasis potensi desa yang berimplikasi pada tercapa-

inya kehidupan yang lebih sejahtera,” terang Yusharto.

Yusharto melanjutkan, kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme bagi perkembangan desa. Sebab desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan daerah, melainkan sebagai subjek dalam melaksanakan pembangunan. “Melalui Undang-Undang Desa tersebut, pemerintah memiliki target mentransformasikan desa secara bertahap, yakni dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri,” jelasnya.

Adapun progres perkembangan dan pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai instrumen pengukuran yang dilakukan pemerintah. Dia mencontohkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 terdapat 6.239 Desa Mandiri, 20.249 Desa Maju, 33.893 Desa Berkembang, 9.234 Desa Tertinggal, dan 4.438 Desa San-



Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntayungo memberikan arahan dalam acara Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara daring dan luring pada Selasa, 28 Februari 2023, di Aula BSKDN Kemendagri, Jakarta.

gat Tertinggal.

Kendati demikian, Yusharto mengatakan kehadiran UU Desa memiliki dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi juga menyisakan beberapa persoalan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai isu sosial politik saat ini, terkait penyelenggaraan pemerintah desa.

“Salah satu persoalan yang muncul yakni usulan perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode, isu lainnya terkait penuntutan hak perangkat desa untuk memiliki status kepegawaian,” tambahnya.

Di sisi lain, Yusharto mengatakan, berbagai kelemahan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa dan kompetensi kepala desa beserta perangkatnya yang masih lemah.

“Lemahnya manajemen pemerintahan desa berpotensi menimbulkan berbagai kendala seperti kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, Lokakarya tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, Guru Besar Universitas Terbuka (UT) Hanif Nurcholis, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sadu Wasistiono, Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam. Kemudian dua narasumber lainnya hadir secara virtual yakni Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto.

• **Novi**

Gelar Workshop Jurnalistik

Tingkatkan Kemampuan Penyusunan Publikasi Kebijakan

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar workshop jurnalistik guna meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan BSKDN perihal penyusunan publikasi kebijakan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Senin, 27 Maret 2023.

Dalam paparannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan berbagai indeks yang dimiliki BSKDN meli-

puti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) perlu dipublikasikan perkembangan hingga pelaksanaannya kepada masyarakat. Dirinya menambahkan, publikasi tersebut harus ditulis secara informatif agar masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaatnya.



“Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta kami untuk lebih banyak memberikan publikasi atas kinerja-kinerja yang dilakukan atau yang telah dicapai oleh Kemendagri melalui jajaran Eselon I yang ada di Kemendagri, terutama untuk BSKDN karena masih merupakan lembaga yang baru,” jelasnya.

Sementara itu, Yusharto mengatakan tahun 2022 inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah daerah (Pemda) mengalami peningkatan hingga mencapai 26.900 inovasi. Hal itu, tambah Yusharto menunjukkan antusias Pemda untuk berlomba-lomba mempublikasikan inovasinya. Kabar demikian perlu disebarluaskan sehingga masyarakat tahu akan perkembangannya.

“Dalam bayangan saya, aplikasi itu (IID) setiap minggu melahirkan preview kita terhadap inovasi setiap provinsi lalu kita ulas, dan itu akan menjadi berita jurnalistik BSKDN kepada khalayak bukan hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat,” terangnya.

Melalui publikasi tersebut, masyarakat juga jadi mengetahui misal Provinsi Jawa Barat berdasarkan 6 variabel dan beberapa indikator inovasi daerah dikategorikan sebagai daerah terinovatif di Indonesia. Dirinya mengaku pihaknya masih menemui beragam kesulitan terkait penyusunan publikasi tersebut. Untuk itu, Yusharto mengatakan pihaknya perlu terus berupaya meningkatkan kemampuan penyusunan publikasi tersebut lewat berbagai pelatihan jurnalistik.

“Disini kelemahan kami bapak, mohon dibantu lewat proses ini (*workshop* jurnalistik) teman-teman kami ini bisa menjadi penulis yang menjadi lebih populer sehingga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang eksistensi BSKDN berikut hasil-hasil kerjanya selama ini,” pungkasnya.

• **Novi**



Cegah Pemalsuan Data Penduduk, KEPALA BSKDN IMBAU JAJARANNYA LAKUKAN AKTIVASI IKD

Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan program Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program ini sebagai pengganti e-KTP sehingga ke depannya persediaan blangko e-KTP tidak akan ditambah lagi. Tidak hanya itu, IKD juga menjadi bagian dari upaya Kemendagri untuk mengatasi maraknya pemalsuan data kependudukan.

Dengan semangat tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengimbau kepada jajarannya untuk melakukan aktivasi KTP Digital (IKD) melalui aplikasi

digital.id dan menyebarkan informasi mengenai digitalisasi KTP tersebut hingga tingkat keluarga.

“Mohon disebar ke keluarga tentang adanya program digitalisasi dan mudah-mudahan sesuai dengan target sampai dengan tahun 2024, 50 persen dari seluruh e-KTP itu sudah terdigitalisasi,” ungkap Yusharto saat memberi arahan dalam acara Pelaksanaan Aktivasi IKD Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BSKDN di Perpustakaan Soepardjo Roestam BSKDN pada Selasa, 21 Maret 2023.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan aktivasi IKD dapat memudahkan seseorang menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu saat harus bepergian atau saat melaku-



kan transaksi. Untuk itu, Yusharto meminta pihaknya juga turut menyelesaikan program tersebut dengan melakukan aktivasi IKD.

Aktivasi IKD tersebut, lanjut Yusharto diikuti oleh 200 pegawai BSKDN. Dengan demikian, dia berharap jajaran-nya terhindar dari kejahatan pemalsuan data penduduk yang membawa banyak kerugian.”Pahami prosedurnya, lakukan aktivasi dan rasakan manfaatnya jadi lebih mudah untuk mengurus masalah administrasi yang beragam dari tingkat pusat hingga tingkat daerah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Pranata Komputer Ahli Muda Ditjen Dukcapil Kemendagri Paturi

mengungkapkan e-KTP atau KTP berbentuk fisik memiliki banyak kekurangan seperti mudah rusak hingga mudah dipalsukan, dengan demikian Ditjen Dukcapil Kemendagri menggantinya dengan program baru yakni IKD yang lebih mudah, aman dan efisien.

“Pengganti KTP fisik adalah KTP Digital yang ada di handphone, sehingga ke depannya Dukcapil itu dalam genggamannya artinya semua dokumen itu ada di handphone, mau KK (Kartu Keluarga), Akta (kelahiran) semuanya ada di situ,” pungkasnya.

• Novi



SAMBUT LEBARAN, BSKDN KEMENDAGRI BAGIKAN SEMBAKO KE PEGAWAI DAN ANAK YATIM

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut lebaran dengan berbagi sembako kepada para pegawai di lingkungan BSKDN dan sejumlah anak yatim. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Rabu, 12 April 2023.

Dalam sambutannya mewakili Kepala BSKDN, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan rasa terima

kasihnya kepada berbagai pihak yang turut membantu terlaksananya acara berbagi sembako jelang hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dirinya juga berharap acara tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi pegawai di lingkungan BSKDN.

“Semoga meskipun sedikit tapi harapannya tetap bermanfaat bagi yang menerima. Kami bersyukur tahun ini masih bisa berbagi, semoga tahun-tahun berikutnya pun tetap bisa berbagi di bulan Ramadan yang



penyuh berkah ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kurniasih juga berharap kepada sejumlah anak yatim yang menerima sembako dan uang tunai agar kelak dapat menjadi anak yang baik dan sukses dalam kehidupannya. “Terutama bagi adik-adik kita ini, anak-anak kita ini yang merupakan generasi selanjutnya agar bisa menjadi anak yang baik, bermanfaat dan sukses di kemudian hari,” ungkap Kurniasih.

Kurniasih melanjutkan, dirinya sangat berharap kegiatan berbagi tersebut, ke depan dapat terus ditingkatkan oleh BSKDN, sehingga penerima manfaatnya akan terus bertambah. “Semoga acara semacam ini terus ditingkatkan, semoga BSKDN tetap dapat berbagi dengan sesama meskipun sedikit yang terpenting manfaatnya,” pungkasnya.

• Novi

LAPORAN UTAMA

mengulik sejarah **BADAN LITBANG KEMENDAGRI**

Teks Novi Foto Dok. BSKDN



Perkembangan penelitian di Indonesia telah melewati perjalanan panjang. Bermula ketika para ilmuwan Belanda melakukan sejumlah penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di Nusantara pada tahun 1778. Kendati saat itu, penelitian yang dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda.

Setelah berhasil melakukan sejumlah penelitian mengenai tumbuh-tumbuhan, Belanda mulai tertarik mendirikan lembaga penelitian pertamanya di nusantara, tepatnya di wilayah Bogor. Lembaga penelitian tersebut diberi nama *S'land Plantentuin* atau lebih dikenal dengan Kebun Raya. Berdiri sejak 18 Mei 1817, lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung berbagai tumbuhan bernilai ekonomi seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan cokelat. Sebelum disebarluaskan ke berbagai wilayah di Nusantara hingga Asia, sejumlah tumbuhan tersebut diteliti terlebih dahulu.

Aktivitas penelitian di Kebun Raya Bogor dapat dikatakan sebagai peletak dasar pelembagaan penelitian pertama di kawasan Nusantara. Kemunculan Kebun Raya Bogor, diikuti berdirinya pusat-pusat penelitian penting lainnya di Nusantara seperti *Organisatie voor Natuurwetenschappelijke Onderzoek* (ONO) atau lebih dikenal dengan Organisasi Penyelidikan Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA). Lembaga tersebut dibentuk Belanda setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 silam atau tepatnya pada 1948.

Kendati Indonesia telah merdeka, perlawanan terhadap penjajah belum usai. Tentara sekutu yang tersisa masih ingin kembali berkuasa. Sehingga, pasca berakhirnya Perang Dunia II mereka berusaha mengambil alih sejumlah daerah di Indonesia yang sempat dikuasai Jepang. Tak hanya itu, di waktu yang sama Indonesia juga harus menghadapi banyaknya pihak asing yang tak menyetujui, bahkan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Semua persoalan tersebut, berdampak pada eksistensi lembaga penelitian OPIPA sehingga fungsinya tidak optimal. Apalagi lembaga tersebut cenderung lebih banyak mewakili kepentingan pemerintah kolonial ketimbang kepentingan riset Indonesia sebagai negara merdeka.

Meski menghadapi banyak persoalan pada awal kemerdekaannya, nyatanya hal itu tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk terus berbenah, khususnya dalam perkembangan riset di Tanah Air. Upaya untuk mendukung perkembangan riset di Indonesia dimulai dengan membentuk lembaga penelitian di sejumlah kementerian salah satunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri membentuk lembaga penelitian dengan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Menurut data terakhir yang dihimpun, Badan Litbang Kemendagri dibentuk pada tanggal 26 Mei 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Fungsi Badan Litbang menurut peraturan tersebut sejumlah aspek di antaranya merumuskan rencana, mengolah dan mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan penelitian serta pengembangan di lingkungan Kemendagri. Fungsi lainnya yakni mengoordinasikan penentuan program pelaksanaan, metode, proses, persyaratan dan pengadaan tenaga keuangan serta perlengkapan, membuat laporan ilmiah dan administratif penelitian hingga pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya itu, fungsi Badan Litbang lainnya yakni mengoordinasikan kegiatan untuk mengamankan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan semua unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Kemendagri. Langkah ini dilakukan dengan menelaah secara keseluruhan hasil kinerja penyelenggaraan unit-unit penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung tugas pokok Kemendagri.

Sejarah Gedung Badan Litbang Kemendagri

Pada tahun 1975 di awal masa berdirinya, Kantor Badan Litbang Kemendagri berada di lingkungan Kantor Pusat Kemendagri di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat bersama dengan komponen Kemendagri lainnya. Namun dalam perjalanannya, pada tahun 1994 Kantor Badan Litbang Kemendagri berpindah ke Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat. Achmad Adnawijaya menjadi Kepala Badan Litbang pertama saat itu dengan masa periode kepemimpinannya dari tahun 1978 hingga 1980.

Namun sebelum ditetapkan sebagai Kantor Badan Litbang Kemendagri, sebuah gedung perkantoran yang terletak di Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat tersebut dahulunya merupakan *Dienst voor Algemene Personele* (DAPZ) yang juga dikenal sebagai Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP). Dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, kantor tersebut dipimpin oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken.

Pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1950 pemerintah mengambil langkah untuk memusatkan urusan kepegawaian dalam satu kantor di Jakarta. Sebab, sebelumnya urusan kepegawaian dilaksanakan di Kantor

Urusan Kepegawaian (KUP) Yogyakarta dan DUUP Jakarta. Pemusatan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelolah kepegawaian semakin dikembangkan menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

Dalam perkembangannya, BAKN berubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga sekarang. Namun, pada tahun 1994 kantornya tak lagi berlokasi di Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat. Gedung KUP pada masa pemerintahan Kolonial Belanda itu pun mulai ditempatin Badan Litbang Kemendagri sejak tahun 1994.

Dukung Perkembangan Penelitian

Pada masa awal berdirinya, Badan Litbang Kemendagri turut aktif mendukung sejumlah kebijakan pemerintah terkait pembangunan nasional hingga pembangunan daerah. Dukungan tersebut dapat dilihat melalui keikutsertaan Badan Litbang dalam berbagai kegiatan diskusi maupun forum seminar. Penelitian yang banyak dilakukan saat itu adalah yang berkaitan dengan masalah pertanian. Penelitian-penelitian tersebut dikoordinasi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Litbang Kemendagri.

Selanjutnya untuk mengatasi berbagai permasalahan agraria, Badan Litbang Kemendagri juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agraria Pusat dan Daerah serta Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jurusan Agraria untuk melakukan penelitian dan pengembangan pertanian. Ini mengingat masalah agraria terkenal cukup kompleks sehingga untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, sangat diperlukan bahan pertimbangan dari berbagai aspek salah satunya adalah hasil penelitian.

Sejumlah lembaga akademis lainnya yang menjalin kerja sama penelitian dengan Badan Litbang Kemendagri di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Sumatera Utara (USU), hingga Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Pada dekade 90-an, penelitian yang banyak dilakukan Litbang Kemendagri adalah penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah atau mengenai otonomi daerah. Tak hanya itu, dalam periode tahun 90-an kerja Badan Litbang Kemendagri cukup banyak berfokus pada Proyek Perencanaan Umum Pemerintah dan Pembinaan Politik Badan Litbang. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim peneliti khusus melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 052 – 260 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Peneliti di Lingkungan Bagian Proyek Perencanaan Umum Pemerintah dan Pembinaan Politik Badan Litbang.



Regulasi lainnya yang dikeluarkan Mendagri untuk meningkatkan hasil penelitian di lingkungan Badan Litbang Kemendagri adalah menjalin kerja sama dengan Kelompok Studi Pemerintahan Daerah dari kampus IIP Jakarta. Hal tersebut tertuang dalam Kepmendagri Nomor 016/BPP/V/1998 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Peneliti/Pengkajian Pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Adapun bentuk kerja sama Badan Litbang dengan Kelompok Studi Pemerintahan Daerah dari IIP tersebut berupa sejumlah penelitian terkait isu-isu mengenai otonomi daerah. Salah satu tema yang diangkat mengenai Evaluasi Persepsi Otonomi Daerah di Kalangan Masyarakat sesuai dengan surat perjanjian kerja bernomor 02/SET/SPK/1998.

Tak hanya mengenai otonomi daerah, sejumlah isu lainnya yang banyak diangkat Badan Litbang Kemendagri adalah penelitian mengenai pengelolaan



Tampak luar gedung Badan Penelitian dan Pengembangan pada jaman dahulu yang tertulis pada gedungnya "Ovele Pensioenfondsen". Waktu pengambilan foto tidak diketahui.

barang milik pemerintah daerah (Pemda), model transportasi kota, prasarana dalam pembangunan industrialisasi di daerah, hingga pengelolaan manajemen keuangan daerah.

Sementara itu, memasuki tahun 2000 Badan Litbang Kemendagri memperkuat perannya sebagai lembaga think tank dengan terus menjalankan roda penelitian dalam berbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah regulasi yang dikeluarkan salah satunya Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 014/BPP/IV/2001 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pada Proyek Litbang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2001. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2001.

Tim peneliti terdiri dari peneliti Litbang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan Daerah, peneliti Litbang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, peneliti Litbang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah serta peneliti Litbang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tim tersebut bertugas menyusun riset desain dan instrumen penelitian, penataran surveyor, pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyusunan dan pemantapan laporan akhir kegiatan penelitian. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Kemendagri dan Otonomi Daerah, dengan masa

kerja 9 bulan pada tahun anggaran 2001.

Pada tahun anggaran 2001, sejumlah penelitian dilakukan Badan Litbang Kemendagri, di antaranya mengenai Kajian Penataan Nomenklatur Program-Program Strategis. Kajian ini dilakukan di Provinsi Bali pada Agustus 2001. Mengingat sejak 1 Januari 2001, terjadi berbagai implikasi yakni perubahan mengenai struktur organisasi seluruh instansi pusat, termasuk Kemendagri dan Otda. Perubahan tersebut cenderung mengarah pada refungsionalisasi unit-unit kerja di lingkungan masing-masing instansi dan revalidasi peranan dan tugas pokok agar sesuai dengan derap perubahan keadaan lingkungan.



Adapun penelitian yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri pada dekade 2000-an meliputi penataan kewenangan revalidasi program strategi Kemendagri dan Otda sebagai masukan bagi pelaksanaan penelitian penataan nomenklatur program-program strategis Kemendagri dan Otda hingga pengelolaan sumber daya kelautan di berbagai provinsi di Indonesia mulai dari Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah. Tak hanya itu, Badan Litbang Kemendagri juga melakukan penelitian mengenai penanggulangan pekerja anak pada sektor informal.

Sementara itu, permasalahan mengenai otonomi daerah kembali muncul pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata di lapangan. Dengan begitu, diperlukan profesionalisme dan kecakapan dalam membangun kebijakan publik. Ini mengingatkan produk penelitian yang berkualitas dapat menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Masih dalam era reformasi dan otonomi daerah hingga jelang akhir tahun 2012, Badan Litbang Kemendagri memperkuat perannya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, akademisi, maupun pelaku bisnis. Pemerintah pusat lewat Badan Litbang

juga mendorong Pemda untuk meningkatkan inovasi dan perkembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk menghadapi krisis. Seperti yang sudah banyak diketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang tersebar di darat dan laut. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dapat dipergunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam kaitan itu, keberlanjutan sistem perekonomian dan sistem kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan SDA, yang berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan.

Guna memperkuat peran kelitbang dan kualitas peneliti, Badan Litbang menyelenggarakan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) 2016 yang digelar di Cisarua, Bogor Jawa Barat pada 11-13 Mei 2016. Dalam forum tersebut di antaranya membahas eksistensi kelembagaan Badan Litbang Daerah menyongsong pergantian PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut saat itu sudah hampir ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Selanjutnya, peningkatan kapasitas peneliti terus diupayakan dari tahun ke tahun oleh Badan Litbang, hal ini tidak lain agar produk penelitian yang dihasilkan dapat menja-



di dasar bagi rumusan kebijakan yang akan dikeluarkan. Namun, terbitnya Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandai bermulanya wajah baru perjalanan riset di Indonesia. Itu artinya, regulasi tersebut menjadi dasar agar aktivitas penelitian dan pengembangan milik pemerintah dilakukan secara terpusat di bawah naungan BRIN.

Di lain sisi, masih berdasarkan regulasi yang sama, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) melakukan sejumlah transformasi kelembagaan. Sejalan dengan itu, berdasarkan surat yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bernomor B/295/M.SM.02.03/2021 menerangkan lima tahapan transformasi SDM yang perlu dilakukan oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkup Kementerian/Lembaga.

Dua di antaranya yakni BRIN melakukan pemetaan kebutuhan atas jabatan fungsional peneliti pasca pengalihan program yang dapat diisi oleh pejabat fungsional peneliti dari Kementerian/Lembaga. Berikutnya, BRIN berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga untuk menentukan pejabat fungsional peneliti dan berkoordinasi secara berkala dengan BRIN

dalam pelaksanaannya. Bagi pejabat fungsional yang tidak beralih ke BRIN, dapat berpindah ke jabatan fungsional lain pada Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Kemendagri menjadi dasar bagi Litbang Kemendagri bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Dengan demikian, BSKDN akan menjalankan tugasnya menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. BSKDN juga tengah menjalankan sejumlah kegiatan strategis salah satunya adalah membuat sistem pendataan skala besar untuk membantu merumuskan kebijakan. Sembari menjalankan kegiatan tersebut, BSKDN juga tetap fokus mengembangkan beragam indeks untuk mempermudah pembinaan ke daerah. Adapun indeks yang dimiliki BSKDN yakni Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

PERKUAT PERAN BINWAS

Lewat Penerapan Fungsi & Tugas

Teks Novi Foto Dok. BSKDN

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berperan melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kemendagri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, BSKDN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Hal itu dilakukan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta lapangan (*evidence based policy*), sebagai bahan masukkan kepada pimpinan untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Upaya pembinaan yang dilakukan BSKDN lebih kepada memfasilitasi daerah dalam rangka mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Pembinaan tersebut juga merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain pembinaan, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga termasuk pada hubungan berwujud pengawasan oleh pusat terhadap daerah.

Dengan demikian, binwas yang dilakukan BSKDN bersifat umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penye-

lenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 3 Ayat 2 mengatur, pembinaan tersebut meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kepala daerah dan DPRD, hingga bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi BSKDN

Seperti telah disebutkan di atas, tugas dan fungsi BSKDN tertuang dalam Perpres Nomor 114 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022. Tugas BSKDN yakni menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi pemerintahan dalam negeri.

Sementara fungsi BSKDN meliputi (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, (2) pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, (3) koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, (4) fasilitasi, pembinaan dan asistensi pelaksanaan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pemerintah daerah, (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, (6) pelaksanaan administrasi badan, serta (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendefinisikan,
menganalisis
masalah
pengembangan
serta menghasilkan
solusi potensial
melalui pelua
cakra
pemb

Penge
gan
lebih j
dap

Ke
intele
inova
p



Dalam menjalankan fungsinya, BSKDN kerap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah seperti Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya tersebut, BSKDN bukan hanya menyosialisasikan tuisi baru yang diembannya, namun sekaligus juga melakukan binwas terhadap daerah tersebut. Harapannya dengan binwas daerah dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayahnya melalui peningkatan inovasi dalam berbagai bidang.

Perkuat Sinergisitas

Pemerintah pusat melalui BSKDN terus berupaya membangun sinergisitas pusat dan daerah. Upaya sinergisitas tersebut dimaksudkan agar rumusan kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) perlu mendasarkan rumusan kebijakan pada isu-isu strategis serta data dan fakta di lapangan.

Perihal sinergisitas tersebut, Yusharto membeberkan pihaknya telah sukses bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah provinsi, kabupaten /kota, lembaga kebijakan serta masyarakat umum dalam penelitian serologi yang bersifat nasional sejak tahun 2020-2022. Penelitian tersebut, kemudian dijadikan dasar merumuskan kebijakan untuk menghadapi era new normal pasca pandemi Covid-19.

“Untuk itu, kita harus terus melakukan inovasi dan

melakukan kolaborasi multi sektoral untuk menjadi jawaban di tengah kehidupan yang terus berubah,” ungkapnya di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh pada Rabu, 1 Maret 2023.

Sinergisitas antara BSKDN dan Pemda tidak hanya untuk melahirkan kebijakan yang lebih efektif. Namun juga sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan inovasi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Adapun upaya yang bisa dilakukan Pemda yakni dengan memastikan sikap konsisten Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut dalam mengawal inovasinya, dari yang semula hanya berupa ide hingga dapat diimplementasikan dan direplikasi kembali.

Dalam kunjungannya ke sejumlah daerah, Yusharto bersama jajarannya terus berupaya mendorong transformasi kinerja berbasis riset dan inovasi pada OPD di setiap daerah. Salah satunya saat Sekretaris BSKDN Kurniasih melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Jawa Timur (Jatim). Menurut Kurniasih, tranformasi kinerja tersebut dilakukan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik.

“Untuk menjawab tantangan ke depan, kita harus kuat di dalam risetnya, semua diputuskan *based on research*. Setiap OPD juga sudah harus bertransformasi dalam kinerjanya,” ungkap Kurniasih dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kelitbangan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jatim di Harris Hotel Surabaya pada Kamis hing-



ga Jumat, 16-17 Maret 2023.

Kurniasih melanjutkan, BSKDN berperan melakukan binwas terhadap Pemda hingga monitoring dan evaluasi strategi kebijakan pusat dan daerah. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi, asistensi, penguatan inovasi, digitalisasi dan penilaian kelembagaan, serta penguatan penyelenggaraan strategi kebijakan.

“Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik kami (BSKDN) memiliki tiga indeks yang sudah berjalan yakni Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD),” tuturnya.

Dia menambahkan, BSKDN juga tengah mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (IT-KPD). Dalam penggunaan indeks tersebut, Pemda tidak perlu menginput data, karena ITKPD merupakan indeks komposit yang diperoleh dari

data kementerian dan lembaga.

Dalam kesempatan lain, Yusharto meminta Pemda melahirkan inovasi berdasarkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 yang berlangsung di Sentul Bogor Jawa Barat pada Selasa, 17 Januari 2023. Dalam arahannya tersebut, Presiden meminta Pemda untuk mendesain dan membangun tata kelola daerahnya dengan baik, sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Menurut Yusharto, potensi yang dimiliki daerah dapat bernilai ekonomis apabila dikembangkan dengan tepat. Dia mencontohkan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) mengenai potensi lokal yang dimiliki daerah, seperti tanaman kelapa dalam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal itu karena tanaman kela-

pa dalam memiliki banyak produk turunan dengan beragam manfaat. Manfaat tersebut bisa sebagai bahan pangan maupun digunakan untuk pengobatan. Jika dihitung secara keseluruhan atas jumlah tanaman kelapa dalam di Indonesia, maka valuasinya dapat mencapai 140 triliun.

“Sekarang potensi (seperti) itu ada di mana? dengan Sulawesi Utara yang men-declare sebagai negeri nyiur melambai pasti memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan provinsi yang lain yang sudah lebih melirik kelapa sawit dibandingkan kelapa dalam umpama, (semangat) ini yang harus terus digelorakan,” ungkapnya dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 di Aula Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut pada Rabu, 29 Maret 2023.

Tidak hanya mengenali potensi lokal dan mengembangkannya menjadi



inovasi yang berkualitas, daerah juga dituntut menjadikan inovasi sebagai habit dalam bekerja. Dengan begitu, inovasi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing atau sulit dijangkau. Yusharto menjelaskan, OPD perlu memahami konsep penciptaan inovasi dari masalah yang dihadapi saat bekerja. Banyak pihak menyebut inovasi seperti itu sebagai inovasi frugal atau inovasi sederhana yang berangkat dari kebutuhan.

“Kita pikirkan hal-hal sederhana yang berasal dari permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai cara-cara baru dari perspektif masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Itu adalah cara baru dalam bekerja dan ini bisa didefinisikan sebagai inovasi,” jelasnya di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 4 April 2023.

Dalam beragam kesempatan, Yusharto mendapati masih banyak daerah yang belum mendasarkan inovasinya pada riset. Dampaknya, inovasi yang dikembangkan bukanlah inovasi yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, inovasi tersebut tidak memiliki nilai keberlanjutan dan kemanfaatan yang maksimal. Maka dari itu, pihaknya membeberkan sejumlah strategi penting bagi daerah untuk meningkatkan inovasinya.

Salah satu strategi tersebut yakni dengan mendorong peningkatan kualitas dan pemanfaatan pementapan regulasi atau kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi lainnya yakni dengan mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dia berharap, setiap daerah dapat membentuk ekosistem inovasi di wilayahnya masing-masing. Dirinya juga menambahkan, jika ekosistem inovasi sudah terbentuk, maka tidak ada inovasi yang berhenti atau tidak ditindaklanjuti, tetapi justru akan diperluas dengan inovasi lainnya. “Kami berharap inovasi itu berkelanjutan dan meluas membentuk satu ekosistem menjadi suatu gerakan bersama sehingga dari

waktu ke waktu akan terus memiliki nilai bagi masyarakat,” tuturnya.

BSKDN juga tengah berfokus pada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Hal itu di antaranya meliputi penguatan penerapan strategi kebijakan pusat dan daerah dengan memberikan pembinaan penerapan digitalisasi.

Program kerja lainnya yakni pembentukan kelembagaan, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, terlebih dalam penerapan Program Langit Biru (Prolabir) untuk kontribusi terhadap pengurangan pencemaran udara. Program selanjutnya yakni penguatan proyeksi *Green Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* terkait penguatan lingkungan hidup dan penerapan *smart city* serta *smart village*.

• **Novi**

Tingkatkan Kualitas Pemda Lewat Pengukuran Berbasis Indeks

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan fungsi yang tak bisa dipisahkan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berbagai upaya dilakukan BSKDN untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkualitas.

Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui berbagai pengukuran berbasis indeks terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran berbasis indeks ini dikembangkan melalui sejumlah metode pengukuran, sehingga menghasilkan nilai yang objektif. Berbagai hasil pengukuran tersebut menjadi dasar BSKDN dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah (Pemda), sekaligus membangun iklim kompetitif antar daerah. Dengan demikian, Pemda semakin terpacu untuk berlomba-lomba menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.

Tak tanggung-tanggung, indeks yang dibangun BSKDN tidak hanya untuk mengukur satu urusan. Namun, BSKDN membangun indeks dari inovasi daerah, keuangan daerah, kepemimpinan di daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks tersebut di antaranya pertama Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dikembangkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kedua, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dikembangkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kewilaya-

han, Kependudukan dan Pelayanan Publik. Ketiga, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dikembangkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa. Keempat, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dikembangkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pacu Ekosistem Inovasi Daerah

Inovasi daerah diharapkan menjadi solusi atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah dapat menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah. Inovasi daerah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat tersebut, BSKDN rutin menggelar program unggulannya sejak tahun 2007 yakni Innovative Government Award (IGA). Gelaran ini merupakan ajang penghargaan tahunan bagi daerah yang berhasil melaksanakan inovasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Daerah terinovatif ditentukan berdasarkan nilai kematangan inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah (Pemda) kepada pemerintah pusat melalui BSKDN. Dalam hal ini, BSKDN mengukur kematangan

inovasi suatu daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah (IID). Selanjutnya, daerah terinovatif akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).

Pada penyelenggaraan IGA tahun 2022, partisipasi Pemda dinilai meningkat cukup signifikan. Sebanyak 510 Pemda melaporkan inovasinya dengan total sebanyak 26.900 inovasi. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang diikuti 519 Pemda dengan jumlah inovasi sebanyak 25.124 inovasi. Sementara secara berurutan pada 2020, 2019, dan 2018, Pemda yang berpartisipasi diketahui sebanyak 484, 260, dan 188 Pemda dengan total inovasi yakni 17.779, 8.016, dan 3.718.

Terkait penyelenggaraan IGA tahun 2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BSKDN Yusharto Huntoung mengimbau Pemda untuk terus meningkatkan inovasi di daerahnya masing-masing. Dalam berbagai kesempatan, Yusharto juga mengimbau agar dalam berinovasi Pemda tetap memperhatikan komposisi data yang digunakan agar inovasi yang dilaporkan memiliki nilai kematangan yang cukup.

“Agar dalam upaya peningkatannya (Inovasi) semua pihak memperhatikan tingkat kematangannya, dengan begitu tidak ada lagi inovasi yang ditolak (tidak memenuhi syarat) di tahun-tahun berikutnya,” ungkap Yusharto dalam keterangannya saat melakukan kunjungan kerja ke Lombok Timur pada Senin, 14 Maret 2022.

Dalam kesempatan lain, Yusharto

berharap, pada tahun 2023 partisipasi Pemda dalam melaporkan inovasi terus meningkat. Dirinya optimis pihaknya dapat mendorong Pemda untuk segera melaporkan inovasinya dengan tertib. Dia menambahkan, inovasi yang terlapor pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 30.000 inovasi. Guna meningkatkan jumlah inovasi yang terlapor tersebut, dia meminta jajarannya untuk melakukan pendekatan terhadap Pemda terutama kepada daerah yang belum melaporkan inovasinya.

“Masih terdapat sekitar 31 daerah yang tidak melaporkan inovasi. Di tahun 2023 di awal-awal ini, ayo kita dekati daerah-daerah tersebut sehingga proporsi daerah yang melaporkan inovasi di tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022,” ungkap Yusharto dalam keterangannya Senin, 20 Maret 2023.

Kualitas Pengelolaan Keuangan

IPKD menjadi indeks berikutnya yang dimiliki BSKDN. Indeks ini untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan sejumlah dimensi meliputi (1) Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengembangan, (2) Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (3) Dimensi Transparansi Keuangan Daerah, (4) Dimensi Penyerapan Anggaran, (5) Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan (6) Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengukuran IPKD telah dilakukan pada tahun 2022 terhadap dokumen pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 di seluruh provinsi. Hasilnya, nilai IPKD tertinggi untuk kategori provinsi dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi dicapai oleh Provinsi Banten dengan total nilai 79, 5230 berkategori baik.

Nilai IPKD tertinggi juga dicapai oleh

Provinsi Kalimantan Barat dengan klaster kemampuan keuangan sedang dengan nilai IPKD sebesar 80, 1922 berkategori baik. Sementara itu, nilai IPKD tertinggi untuk provinsi dengan klaster kemampuan keuangan rendah dicapai oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 80,7651 berkategori baik.

“Hasil pengukuran ini (IPKD) harapannya dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing,” ungkap Yusharto saat memberi arahan dalam acara Pengukuran IPKD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2022 di Hotel Harmoni One Batam pada, Kamis, 23 Februari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Heru Tjahyono mengungkapkan, salah satu kendala yang kerap dihadapi Pemda dalam meningkatkan nilai IPKD adalah minimnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penginputan data secara benar. Oleh karenanya, kesadaran setiap OPD untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan.

“Kami (BSKDN) berterima kasih sekali karena dilibatkan dalam acara ini, semoga dapat menambah pengetahuan atau memperdalam pengetahuan Bapak/Ibu sekalian mengenai input data terkait IPKD ini,” tutur Heru saat menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) IPKD Lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalsel. Acara tersebut digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel di Hotel Grand Cemara Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Maret 2023.

Pasalnya, menurut Heru, proses kesesuaian penginputan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hasil nilai IPKD. Untuk itu, Heru mengimbau kepada seluruh Pem-

da untuk terus memperbaiki proses penginputan data terkait IPKD. Sejalan dengan itu, Heru juga mengingatkan agar Pemda selalu berupaya menyinergikan antara dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. “Pemda bisa mulai mengambil langkah-langkah tersebut untuk memperbaiki penilaian IPKD,” tegasnya.

Ukur Kinerja Kepala Daerah

Kemudian IKKD merupakan indeks yang disusun untuk mengukur dan menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran tersebut diharapkan dapat memotivasi kepala daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun tugas kepala daerah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Tugas tersebut meliputi kepala daerah bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada daerah untuk dibahas bersama serta menyusun dan menerapkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Tugas lainnya, seperti menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam berbagai kesempatan, Yusharto menegaskan kualitas kepala daerah merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan negara yang lebih demokratis, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kepala daerah juga menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan dan menjaga stabilitas lingkungan di tengah masyarakat.

“Kinerja yang bagus dari kepala daerah harapannya dapat menjadi role model dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Yusharto dalam keterangannya pada Rabu, 16 November 2022.

Sementara itu, Yusharto mengungkapkan, aplikasi IKKD ke depannya ditujukan untuk memudahkan pengumpulan data dan informasi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan begitu, nantinya diharapkan dapat memudahkan kepala daerah untuk berinovasi dan lebih kreatif dalam bekerja. Dirinya menginginkan setiap kepala daerah agar dapat terus meningkatkan inovasi di daerahnya masing-masing.

“Mudah-mudahan setiap kepala daerah dapat berperan aktif dalam menciptakan inovasi dan kreativitas di

daerahnya masing-masing,” tambah Yusharto

Sebagai informasi tambahan, pasca pengukuran IKKD, kepala daerah yang dinilai terbaik akan menerima penghargaan dari Mendagri. Penghargaan tersebut berupa piagam dan trofi yang diserahkan langsung oleh Mendagri kepada kepala daerah. Penghargaan diberikan melalui gelaran Leadership Award yang diinisiasi BSKDN Kemendagri.

Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Di lain sisi, kapasitas dan kemampuan daerah bervariasi, sehingga perlu tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja pembangunan daerah berkelanjutan. Hal inilah yang didorong BSKDN melalui ITKPD yang merupakan pengukur kinerja Pemda terkait tata kelola pemerintahan daerah yang dikembangkan sejak Oktober 2021. Untuk menyempurnakan pengukuran ITKPD, BSKDN menggandeng sejumlah pakar salah satunya Kemitraan dan United States Agency for International Development dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (US-AID ERAT).

Dalam prosesnya, penyusunan ITKPD

melalui berbagai tahapan di antaranya pembelajaran studi literatur, diskusi dengan pakar dan akademisi, uji publik pada seminar internasional, serta uji coba instrumen pengukuran. Sementara itu, output yang telah diselesaikan pada tahun 2022 yaitu berupa instrumen IPKD tingkat provinsi dan hasil uji coba pengukuran terhadap 34 provinsi di Indonesia.

“Pengujian baru dilakukan sekali, dapat diketahui apabila sudah dilakukan dua kali, tiga kali (uji coba) sehingga kita melihat kevalidan dari metodologi maupun cara-caranya (pengukuran ITKPD),” tutur Yusharto dalam keterangannya di Kantor Ombudsman RI Jakarta pada Jumat, 10 Maret 2023.

Kemudian pada akhir 2022, BSKDN telah melaporkan perkembangan ITKPD kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Laporan tertulis mengenai progres sementara kegiatan penyusunan ITKPD tersebut mendapatkan respons yang cukup baik dari Bapak Menteri.

Dalam responsnya, Mendagri meminta BSKDN untuk menindaklanjuti penyusunan ITKPD dengan diskusi bersama stakeholder lainnya khususnya dengan Kementerian PANRB. Ken-



dati telah melakukan uji coba pada 34 provinsi, Yusharto mengaku pihaknya bersama tim Kemitraan masih perlu melakukan beragam penyempurnaan, salah satunya perbaikan terhadap metodologi pengukuran ITKPD. Dirinya berharap berbagai langkah tersebut dapat menghasilkan output pengukuran ITKPD yang lebih dipertanggungjawabkan kevalidannya.

Di lain kesempatan, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan ITKPD diarahkan untuk menjadi indeks komposit yang tidak menggunakan data primer sendiri, melainkan menggunakan data indeks yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Sehingga dibutuhkan data yang sinkron antar K/L, dengan begitu nilai ITKPD yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Kurniasih meminta pihaknya untuk melakukan kolaborasi antar K/L agar akurasi data ITKPD semakin optimal.

“Untuk itu, data antara K/L (kementerian/lembaga) perlu disinkronisasikan agar tidak bias. Dengan demikian, ITKPD sebagai indeks komposit ini dapat menjawab permasalahan di daerah,” jelas Kurniasih dalam keterangannya di Hotel Millennium Sirih Jakarta dalam acara Rapat Konsultasi Pemetaan Indikator ITKPD pada Sela-

sa, 7 Maret 2023.

Terkait kolaborasi antar K/L BSKDN untuk melengkapi data ITKPD agar lebih komprehensif, BSKDN mengaku telah menyelenggarakan rapat konsultasi lintas K/L untuk membahas pemetaan indikator ITKPD. Untuk itu, kegiatan penyusunan ITKPD ditargetkan selesai pada tahun 2023. Melihat tahapan yang telah dilalui, masih terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan, di antaranya pembahasan kerja sama dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan data-data pengukuran ITKPD, pembahasan terkait bisnis proses pelaksanaan pengukuran ITKPD, penyusunan regulasi pendukung pengukuran ITKPD, hingga proses sosialisasi dan diseminasi kepada stakeholder terkait lainnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kurniasih melanjutkan, ITKPD secara inklusif digunakan untuk mengukur proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai efektivitas tujuan pembangunan daerah yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ITKPD juga diharapkan dapat mengukur efektivitas pemerintahan dari perspektif yang lebih komprehensif yang mengkomodasi aspek-aspek

yang mempengaruhi efektivitas proses pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan capaian pembangunan daerah dan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, *Head of Knowledge Management and Learning* Kemitraan Indah Loekman menuturkan, penyusunan ITKPD ke depannya dapat digunakan untuk melihat gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembangunan daerah yang mencakup berbagai sektor. Indah menambahkan, Kemendagri maupun K/L lain dapat menggunakan ITKPD untuk memberikan evaluasi, arahan dan supervisi, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah secara lebih efektif dan akurat. Oleh karenanya, Indah sepakat penyusunan ITKPD harus terus disempurnakan.

“Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2023 ini BSKDN didukung oleh USAID ERAT kembali akan melakukan pengukuran di tingkat provinsi dan juga memperluas di tingkat kabupaten/kota,” jelas Indah dalam keterangannya di Hotel Millennium Sirih Jakarta dalam acara Rapat Konsultasi Pemetaan Indikator ITKPD pada Selasa, 7 Maret 2023.

• **Novi**

Replika Pesawat Kepresidenan Pertama

Monumen Seulawah RI 001 terletak di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dibangun atas prakarsa TNI Angkatan Udara untuk mengingat sejarah kontribusi rakyat Aceh dalam memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lewat sumbangan rakyat Aceh tersebut, Pesawat Seulawah RI-001 ini dapat dibeli dan digunakan untuk pesawat distribusi logistik pemerintah kala itu.

Foto Aji







Kompleks Percandian Muaro Jambi

Kompleks Percandian Muaro Jambi ditemukan oleh tentara Inggris, SC Crook. Kompleks peninggalan peradaban Budha ini memiliki luas 3.891 hektar atau 8 kali lipat dari Candi Borobudur. Meski begitu fungsi bangunannya belum dapat diidentifikasi karena minimnya catatan sejarah.

Foto Fajar





Kepala Badan Litbang periode 1994-1998 Rapiuddin Hamarung tengah duduk di ruang kerjanya di Palang Merah Indonesia (PMI). Meski usianya telah menginjak 83 tahun namun dirinya masih terlihat energik dan bersemangat ketika menceritakan aktivitasnya dulu saat memimpin Badan Litbang.

Dia memulai ceritanya dengan mengungkapkan keprihatinannya terkait anggaran Litbang yang dinilai sangat kecil, begitu pun dengan anggaran Litbang di daerah. Kondisi itu mempengaruhi terselenggaranya program kerja yang jauh dari maksimal. Rapiuddin mengatakan anggaran Litbang di daerah masih bergantung dari keputusan kepala daerah masing-masing. Artinya, tidak ada regulasi yang mengatur mengenai standar besaran anggaran Litbang di daerah

“Makanya saya buat sama menteri waktu itu menterinya Pak Yogie Almarhum (Raden Mohammad Yogie Suardi Memet Mendagri 1993-1998),

pak sekjennya Pak Suryatna (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri 1993-1998 Suryatna Subrata) akhirnya mengeluarkan keputusan menteri bahwa setiap daerah harus memberi dana kalau engga salah 2 atau 2,5 % dari jumlah APBD mereka untuk Litbang” ungkap Rapiuddin.

Bukan hanya anggaran Litbang yang menjadi perhatian Rapiuddin, dirinya juga fokus membenahi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Badan Litbang Kemendagri. Upaya tersebut ditempuh dengan memperhatikan komposisi SDM itu sendiri. Rapiuddin memastikan SDM yang dimilikinya adalah SDM yang unggul. “Saya benahi di situ (SDM) supaya penelitian kita berjalan dengan orang-orang yang pintar,” jelasnya.

Rapiuddin menuturkan salah satu kegiatan yang melekat dalam ingatannya di akhir masa jabatannya sebagai Kepala Badan Litbang saat itu adalah terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Regulasi tersebut menurut Rapiuddin juga membahas mengenai penerapan otonomi daerah.

Selanjutnya, tim Media BPP juga berkesempatan mewawancarai Mantan Kepala Badan Litbang periode 2001-2006 Tursandi Alwi. Kegemarannya dengan dunia olahraga membuatnya tetap menyibukkan diri meski usia tak lagi muda. Sehari-harinya ia mengaku disibukkan dengan aktivitasnya sebagai wakil ketua umum III Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat. Selain disibukkan dengan aktivitasnya di KONI, dirinya juga menjalani hobinya bermain golf, meski semula ia mengaku lebih menyukai tenis. Namun, karena faktor usia dirinya terpaksa berhenti bermain tenis dan beralih ke golf.

Setelahnya, Tursandi menceritakan kesibukannya semasa menjadi Kepala Badan Litbang. Dia mengaku saat itu kebanyakan Litbang di daerah masih menjadi satu dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal itu membuatnya

Kepala BPP Periode 1994-1998
Rapiudin Hamarung, SH

Kepala BPP Periode 2001-2006
H. Tursandi Alwi

Kepala BPP Periode 2006-2008
Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA

Kepala BPP Periode 2010-2012
Dr. Muh. , Marwan, M, Si

Kepala BPP Periode 2014-2015
Dr. Drs. Afriadi Syahbana
Hasibuan, MPA, M.Com

Kepala BPP Periode 2014-2015
Dr. Drs. Afriadi Syahbana
Hasibuan, MPA, M.Com

Kepala BPP Periode 2018-2020
Drs. Dodi Ryadmadji, MM

merasa Litbang belum memiliki mitra kerja di daerah untuk bersama-sama memperbaiki dunia riset Indonesia. Dengan alasan itu, ia mengajak kepala daerah untuk membentuk Litbang di daerah salah satunya membentuk Litbang di tingkat provinsi. “Beberapa gubernur saya kenal, akhirnya ada rujukan hukumnya saya coba ngajak Pak Gubernur bentuk memisahkan Litbang itu dari Bappeda” ungkap Tursandi.

Pembentukan Litbang di sejumlah provinsi di Indonesia juga diikuti pembentukan Litbang di beberapa kabupaten dan kota. Setelah terbentuknya Litbang di daerah, Badan Litbang Kemendagri rutin melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Litbang. Hal itu merupakan bagian dari upaya Badan Litbang untuk tetap eksis dan berdaya merekomendasikan kebijakan kepada Kemendagri. Dalam penyelenggaraan Rakernas, Badan Litbang Kemendagri berkolaborasi

dengan Litbang di daerah. Menurut Tursandi, hal itu merupakan langkah yang paling tepat agar pemerintah pusat melalui Litbang Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda) melalui lembaga kelitbangannya, agar saling bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan dihadapi terkait penelitian.

Meningkatkan kompetensi SDM peneliti juga jadi hal penting lainnya yang menjadi prioritas Tursandi. Dia mengaku mewajibkan peneliti dan para Kepala Pusat (Kapus) Litbang Kemendagri untuk rutin membuat telaahan yang nantinya akan direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Membuat telaahan-telaahan menjawab isu-isu yang sering timbul terutama di media massa waktu itu. Nah kita serahkan (hasil telaahan) kepada Pak Mendagri sebagai masukan,” ungkapnya.

Tak hanya meningkatkan kompetensi peneliti, Tursandi juga menyediakan ruang kerja yang nyaman bagi para peneliti dengan merenovasi gedung lama dan membuat partisi-partisi agar para peneliti memiliki ruang kerja masing-masing. Harapannya hal itu bisa mendukung kinerjanya menjadi lebih efektif. “Gedung yang layak itu, tempat yang layak itu, bisa memberikan semangat dan kepercayaan diri dari teman-teman saya yang kerja di Badan Litbang” pungkasnya.

Sementara itu, saat ditemui di kediamannya di daerah Jakarta Timur Kepala Badan Litbang Kemendagri periode 2006-2008 Ngadisah tengah sibuk dengan aktivitasnya sebagai Dosen di Universitas Terbuka (UT). Rupanya pasca pandemi dirinya mengaku lebih banyak beraktivitas di rumah termasuk aktivitas mengajar dilakukan secara daring. Saat ditanya mengenai aktivitasnya saat menjadi Kepala Badan, dirinya sangat antusias menjelaskan.

Adapun itu, keterbatasan jumlah peneliti menjadi satu dari beberapa hal lainnya yang dikeluhkan Ngadisah saat

memimpin lembaga tersebut. Keberadaan peneliti yang terbatas kerap menjadi penyebab ketelambatan Litbang dalam memberi masukan pada Mendagri. Untuk itu, Ngadisah mengusulkan kepada Mendagri untuk mengangkat peneliti baru agar jumlah peneliti di Litbang Kemendagri kian bertambah. Hal itu sejalan dengan keinginan Ngadisah untuk menjadikan Litbang sebagai pusat data di Kemendagri. “Kami usulkan 20 orang peneliti, semuanya dapat itu tenaga peneliti fungsional,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ngadisah mengaku sejumlah peneliti masih kurang berantusias saat melakukan penelitian sehingga yang terjadi tidak serius saat menangani penelitian tersebut. Setelah diamati menurutnya masalah anggaran penelitian yang kecil jadi faktor penyebabnya.

“Karena anggaran yang diberikan kecil, kita hanya bisa melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya lokal, kalau yang penelitian-penelitian besar yang sifatnya strategis secara nasional itu susah kita tidak pernah bisa melaksanakan itu,” jelasnya.

Pada kurun waktu 2010-2012 Badan Litbang Kemendagri dibawah kepemimpinan Kepala Badannya saat itu Muh. Marwan melakukan sejumlah reformasi organisasi meliputi mereformasi SDM di lingkungan Badan Litbang, mereformasi aturan kelitbangan yang masih sangat minim, mereformasi sarana dan prasarana hingga mereformasi kelembagaan. Dengan demikian, saat itu nama Badan Litbang Kemendagri mulai berganti menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri.

“Saat itu pas gencar-gencarnya reformasi birokrasi. Posisi saya kebetulan waktu itu wakil ketua reformasi birokrasi di Kemendagri. Jadi program utama saya waktu itu adalah mereformasi Badan Penelitian dan Pengembangan. Jadi bukan ke produk dari Badan Litbang, tetapi lebih membenahi mereform,” terangnya.



Laki-laki yang kini telah pensiun dan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga di rumah mengaku saat itu, BPP mengadakan pelatihan penelitian bersama LIPI dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tidak hanya itu, keberadaan majalah dan jurnal pada saat itu juga mulai dikembangkan untuk mendapatkan akreditasi yang lebih baik. “Media itu (jurnal) saat itu kualifikasinya B, terakreditasi maksud saya, tadinya kan engga,” jelasnya.

Tim Media BPP juga berkesempatan menyambangi kediaman Kepala BPP Kemendagri periode 2014-2015 Afriadi Syahbana Hasibuan di daerah Bogor. Afriadi mengawali pembicaraan dengan menceritakan pengalaman kerjanya sebelum ia memimpin BPP. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kemendagri diakui menjadi tempat kerjanya sebelum pindah ke BPP. Saat di Bangda, Afriadi berkesempatan berkunjung ke Jepang untuk belajar pola pembangunan di negeri sakura tersebut.

Dia menjelaskan, saat berada di Jepang dirinya berkesempatan belajar *One Village One Product* (OVOP) atau yang kerap disebut sebagai pro-

duk unggulan daerah. Konsep yang sangat populer dan banyak diterapkan di negara-negara maju ini pada intinya setiap daerah menetapkan satu produk unggulannya untuk dikembangkan menjadi produk yang memiliki keunggulan sehingga dapat bersaing dengan produk dari daerah lainnya, bahkan bisa menembus pasar Internasional. “Semua pengalaman tersebut (OVOP) saya bawa (saat pindah) ke Litbang, tapi dibungkus dengan inovasi,” ungkapnya.

Untuk menunjang penerapan inovasi yang disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas agar dapat dijalankan dengan baik. Sebelum masa jabatannya habis, Afriadi mendapati ada enam regulasi kelitbangan yang menjadi fokus BPP saat itu, salah satu di antaranya regulasi mengenai inovasi daerah. Namun sayangnya, dirinya tak dapat merampungkan draf regulasi tersebut karena telah mencapai usia pensiun. Kendati demikian, ia tetap berusaha meningkatkan eksistensi Litbang dengan mendirikan Pusat Inovasi Daerah sebagai salah satu pusat penelitian di BPP Kemendagri.

“Pusat Inovasi Daerah itulah yang menjadi motor dari pada Litbang

(BPP) dan ini akan besar” ungkapnya.

Di lain sisi, Kepala BPP periode 2017-2019 Dodi Riyadmadji mengenang kembali usahanya mengawal regulasi mengenai inovasi. Berbagai tantangan harus dihadapi terlebih tantangan yang berkaitan dengan anggaran. Kendati demikian, Dodi sangat optimis regulasi tersebut kelak dapat diimplementasikan BPP sebagai dasar kegiatan penghargaan daerah terinovatif yang kini dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). IGA yang digelar setiap tahunnya oleh Kemendagri melalui BSKDN ini merupakan ajang penghargaan bagi daerah terinovatif di Indonesia. Daerah yang menjadi pemenang akan diteruskan informasinya pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk diberikan Dana Intensif Daerah (DID).

“Nah tentunya saya bekerja kalau tidak dilapisi oleh kepala-kepala pusat, lalu kemudian kepala-kepala bidang pada waktu itu, ya engga bisa. Tetap kami juga kerja teamwork untuk bisa menggapai dari apa yang saya lakukan,” jelasnya.

• **Novi**

Pengendalian Inflasi melalui Metode Statistika: Cluster Analysis

Inflasi menjadi permasalahan ekonomi yang krusial dan serius karena menyangkut kesejahteraan masyarakat yang bisa berdampak terhadap ketidakstabilan dalam perekonomian. Menurut Bank Indonesia, Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja dan hanya bersifat sementara tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan menyebabkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi Indonesia pada bulan September 2022 sebesar 5,95% tercatat sebagai inflasi tertinggi sejak November 2015. Nilai tersebut juga melebihi target atau sasaran inflasi tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Sejak Juni 2022, inflasi Indonesia telah melebihi target tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian inflasi untuk mengembalikan inflasi ke tingkat yang rendah dan stabil, agar tingkat inflasi dapat tercapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Inflasi yang rendah dan stabil akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Indonesia telah membuat kebijakan moneter sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi. Namun, kebijakan moneter Bank Indonesia hanya ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Sementara itu, selain dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya bencana seperti banjir yang berdampak terhadap hasil panen. Sehingga



Ayu Febriana Dwi R.
Statistisi Ahli Pertama
BSKDN Kemendagri

diperlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi. Sejak tahun 2005, telah dibentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sebagai wujud dari koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 2008, pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah dan terbentuklah TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah).

Tingginya inflasi pada bulan September 2022 yang tercatat sebagai inflasi tertinggi sejak tujuh tahun ke belakang tersebut membuat Bank Indonesia, TPI pusat dan daerah harus lebih ekstra dalam melakukan koordinasi dan menentukan kebijakan yang lebih efektif untuk mengembalikan inflasi ke tingkat yang rendah dan stabil. Kebijakan yang diambil untuk pengendalian inflasi perlu dilakukan secara spesifik dan sesuai karakteristik setiap daerah agar hasilnya dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi setiap daerah. Tingkat inflasi yang bervariasi di setiap daerah di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ketersediaan pangan, distribusi dan sistem logistik yang dipengaruhi letak dan kondisi geografis setiap daerah, serta dapat juga dipengaruhi

oleh musim di setiap daerah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap daerah. Beberapa hal yang mempengaruhi bervariasinya tingkat inflasi di setiap daerah tersebut bisa juga memberikan pengaruh yang sama di beberapa daerah yang lain. Jadi, mungkin saja terdapat beberapa daerah yang memiliki karakteristik yang sama terkait kondisi perekonomian berdasarkan tingkat inflasi.

Sehingga penulis ingin memberikan suatu *insight* yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi yaitu dengan melakukan pengelompokan daerah di Indonesia berdasarkan tingkat inflasi. Inflasi di daerah dihitung pada 90 kota yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota yang merupakan cakupan kota SBH (Survei Biaya Hidup) 2018 yang biasa disebut dengan 90 kota inflasi. Pengelompokan dapat dilakukan pada 90 kota inflasi untuk melihat kota mana saja yang memiliki karakteristik yang sama berdasarkan tingkat inflasi. Dengan begitu, selain mengambil kebijakan untuk pengendalian inflasi yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, pemerintah daerah juga dapat bekerjasama dan bersinergi dengan daerah lainnya yang memiliki karakter-

istik yang sama dengan daerahnya dalam hal tingkat inflasi. Sehingga diharapkan kebijakan yang diambil nantinya akan lebih efektif dan efisien, serta dapat lebih tepat sasaran dalam mengendalikan inflasi karena kebijakan diambil sesuai dengan karakteristik hasil pengelompokan yang dilakukan.

Dalam ilmu statistika, terdapat metode analisis yang dapat digunakan untuk mengelompokkan observasi yaitu analisis *cluster* (analisis kelompok). Analisis *cluster* merupakan salah satu metode data mining yang digunakan untuk mencari data kemudian mengelompokkannya berdasarkan *similarity* (kemiripan karakteristik) antara satu data dengan data yang lain, sehingga observasi yang berada dalam *cluster* yang sama mempunyai sifat yang relatif homogen daripada observasi yang berada dalam *cluster* yang berbeda. Terdapat dua jenis analisis *cluster* yang dapat digunakan yaitu *hierarchical clustering* dan *non-hierarchical clustering*. Metode *hierarchical clustering* adalah metode pengelompokan yang digunakan untuk mengelompokkan observasi secara terstruktur berdasarkan ukuran kemiripan, dimana pengelompokan dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih obyek yang mempunyai kesamaan yang paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke obyek lain yang mempunyai kedekatan kedua, demikian seterusnya. Pada *hierarchical clustering*, jumlah *cluster* yang diinginkan tidak dapat ditentukan oleh peneliti, jumlah *cluster* yang terbentuk mengikuti *output* analisis data yang dihasilkan dari metode *hierarchical clustering*. Sementara jika peneliti ingin menentukan jumlah *cluster* yang terbentuk, maka dapat menggunakan metode *non-hierarchical clustering* yang merupakan metode pengelompokan jika jumlah *cluster* yang akan dibentuk sudah ditentukan. Penentuan jumlah *cluster* pada metode *non-hierarchical clustering* dapat didasarkan pada rujukan teoritis, kondisional, ataupun tujuan peneliti.

Analisis *cluster* dapat digunakan untuk mengelompokkan observasi dalam hal ini yaitu 90 kota inflasi di Indonesia. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan nilai inflasi pada 11 kelompok pengeluaran. Berdasarkan hasil SBH 2018, Indeks Harga Konsumen (IHK), yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi), dihitung berdasarkan beberapa komoditas barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi 11 kelompok pengeluaran, antara lain: kelompok makanan, minuman, dan tembakau;

kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

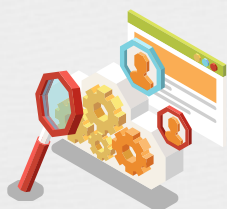
Jadi, pengelompokan 90 kota inflasi di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis *cluster* berdasarkan 11 kelompok pengeluaran tersebut. Dari hasil analisis *cluster*, dapat diketahui kota-kota mana saja yang memiliki karakteristik yang sama dan berada dalam satu *cluster*. Sehingga pemerintah-pemerintah daerah yang berada dalam *cluster* yang sama dapat membuat kebijakan yang sama untuk pengendalian inflasi karena memiliki karakteristik yang sama berdasarkan 11 kelompok pengeluaran tersebut. Selain itu, hasil *cluster* juga dapat menunjukkan kelompok pengeluaran mana yang cenderung tinggi pada masing-masing *cluster* yang terbentuk, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih spesifik dan fokus terhadap kelompok pengeluaran yang cenderung tinggi tersebut. Perlu dibuat kebijakan yang fokus untuk menekan dan menstabilkan tingkat konsumsi masyarakat pada kelompok-kelompok pengeluaran yang cenderung tinggi pada setiap *cluster*. Sehingga, diharapkan tingkat inflasi pada kelompok-kelompok pengeluaran yang awalnya cenderung tinggi tersebut dapat kembali stabil dan terkendali. Dengan begitu, sistem pengendalian inflasi dapat terwujud secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik setiap *cluster*.

Jadi ke depan, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diharapkan akan semakin efektif dengan didukung adanya kerjasama antar Pemerintah Daerah satu dengan Pemerintah Daerah lainnya yang memiliki karakteristik yang sama berdasarkan tingkat inflasinya. Sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

REKAPITULASI

PENGINP UTAN DATA INOVASI PASCA PENUTUPAN SISTEM INDEKS INOVASI DAERAH

17 SEPTEMBER 2022



INOVASI
UJI COBA
1473



INOVASI
PENERAPAN
23.817



INOVASI
INISIATIF
1.610

TOTAL INOVASI **26.900**

100%

KLASTER PROVINSI
34/34

92,5%

KLASTER KABUPATEN
384/415

98,9%

KLASTER KOTA



Benteng Marlborough (Inggris: Fort Marlborough) adalah benteng peninggalan Inggris di Kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company (EIC) tahun 1714-1719 di bawah pimpinan gubernur Joseph Callet sebagai benteng pertahanan Inggris.

Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825-1942, Jepang tahun 1942-1945, dan pada perang kemerdekaan Indonesia. Sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng itu menjadi markas Polri. Namun, pada tahun 1949-1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, benteng Marlborough menjadi markas TNI-AD. Pada tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya.

bercerita
**BENTENG
MARLBOROUGH**

Foto Fajar





Pemandu wisata yang menemani kami menjelaskan bila lokasi wisata sejarah Benteng Marlborough terdapat peninggalan-peninggalan para tahanan tentara Belanda yang ditawan oleh tentara Jepang serta alat peperangan tentara Jepang.

Yang menjadi perhatian kami adalah adanya sebuah tulisan grafiti tahanan tentara Belanda di sebuah penjara Benteng Marlborough. Disana tertulis sebuah tulisan Belanda yang jika diartikan *"Barangsiapa mengamati kompas ini janganlah memarahi yang membuat coretan ini, ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret-coret disini dan aku saya menulis ini"* (diterjemahkan oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio) Sekitar setengah jam berada di lokasi penjara Benteng Marlborough, kami berjalan menuju halaman dalam Benteng Marlborough, disana terdapat beberapa bangunan disisinya dan pada bagian tengah halaman terdapat 7 meriam peninggalan benteng tersebut.

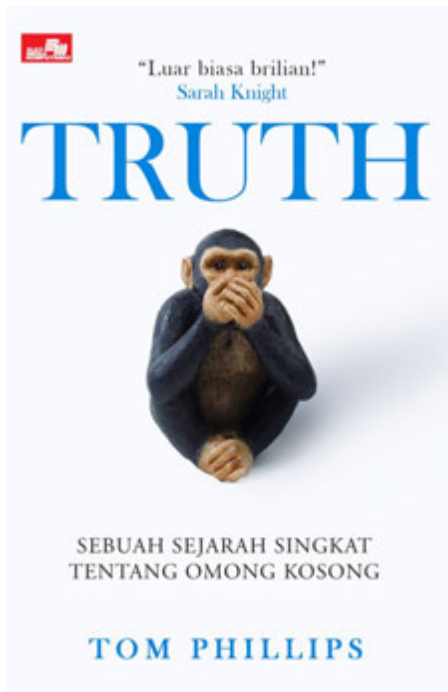
Selesai mengabadikan momen, kami berpindah menuju bagian atas benteng yang dahulu merupakan tempat penjagaan atau pengawasan para tentara untuk mengamati musuh. Dari sana kita dapat melihat seluruh areal dalam benteng secara luas yang dirawat dengan baik. Beberapa bagian ruang sudah direkondisi dan bagian ruang lainnya masih diajag keasliannya.

Sungguh menjadi pelajaran yang menarik dapat berwisata sejarah di Benteng Marlborough. Mengetahui sejarah-sejarah dan sebagian kecil cerita yang tertinggal yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.





Benarkah Kita Sekarang Berada di Era Pasca Kebenaran?



Judul buku: *Truth: Sebuah Sejarah Singkat tentang Omong Kosong*

Penulis: Tom Phillips

Penerjemah: Novia Angelina

Penerbit: Elek Media

Komputindo

Tahun Terbit & Cetakan: 2021

Jumlah halaman:

xx + 260 halaman

ISBN: 978-623-00-2488-7

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Benarkah kita sekarang berada di era pasca-kebenaran, era di mana arus informasi sedemikian derasny sehingga kebohongan dapat dengan begitu mudah disamarkan sebagai kebenaran? Faktanya, kita memang telah kenyang dengan berbagai kabar yang dianggap benar dan menyebar dengan begitu cepat namun pada akhirnya terbukti bahwa itu hoaks belaka. Ya, kita memang hidup dalam masa-masa seperti itu.

Namun pemilihan istilah pasca-kebenaran itu sendiri menyiratkan bahwa kita telah melewati masa di mana kebenaran pernah dijunjung tinggi dan kebohongan publik tidak laku. Pernahkah masa seperti itu ada? Tom Phillips dalam buku ini menunjukkan bahwa jawabannya adalah tidak. Kebohongan publik telah terdokumentasikan setidaknya semenjak peradaban manusia itu sendiri.

Ketika para arkeolog mengekskavasi lahan bekas kota kuno Ur di wilayah Mesopotamia (sekarang Irak selatan), mereka membongkar sebuah rumah yang menyimpan banyak tablet tanah liat bertuliskan aksara paku. Mereka mengekstrak informasi dari tulisan dalam tablet-tablet tersebut, lalu diketahui bahwa rumah itu adalah milik seorang pengimpor tembaga bernama Ea-nasir. Dia membujuk orang-orang untuk menginvestasikan sejumlah uang padanya untuk ditukar dengan tembaga berkualitas tinggi di masa depan, ketika dia kembali dari Dilmun, agak jauh

ke pesisir Teluk Persia. Namun ketika Ea-nasir kembali, dia hanya menyediakan tembaga dengan kualitas buruk. Serangkaian surat keluhan dalam tablet-tablet tanah liat dilayangkan melalui utusan.

Ea-nasir tidak menyimpan salinan untuk jawabannya, tapi dari urutan surat-surat keluhan tersebut kita tahu bahwa dia mengabaikan para pelanggannya. Ketika uang sudah berada di pundi-pundinya dia mengatakan sesuatu yang setara “Hanya ada ini. Ambil atau tinggalkan. Tapi tidak ada uang kembali.” Ini adalah investasi bodong tertua yang kita ketahui sejauh ini.

Penipuan semacam ini dapat memberikan keuntungan dengan mudah, namun hanya berlaku dalam waktu singkat saja. Rumah Ea-nasir besar dan mewah pada awalnya, namun pada akhir periode ketika dia berdagang, sebagian rumahnya kelihatannya telah direbut paksa dan digabung dengan rumah tetangganya (hlm. 196).

Penipuan terhadap publik bisa datang dalam berbagai bentuk, terkadang bentuknya juga sangat aneh. Seperti mengaku-aku telah dinobatkan sebagai raja dari kerajaan tertentu, kemudian meminta orang-orang menginvestasikan sejumlah uang untuk ditukar dengan jabatan di kerajaan delusional itu.

Hari ini kita tidak asing dengan sosok seperti Totok Santoso yang tiba-tiba saja mendaku diri sebagai raja di Keraton Agung Sejagat, atau, sejawatnya yang jauh lebih terkenal, Ranga Sasana dari Sunda

Empire yang mengklaim dapat melucuti senjata nuklir dari negara-negara adikuasa di dunia. Keduanya tentu saja segera ditangkap dan dipenjara karena menyiarkan berita bohong. Kabar Totok menghilang dari dunia maya sementara Rangga justru menjadi terkenal dan sempat diundang ke berbagai acara televisi maupun podcast youtube terkenal.

Apa yang mengejutkan adalah, praktik mereka bukan barang baru. Gregor MacGregor sudah melakukan itu dua ratus tahun sebelumnya. Dia kembali dari Amerika Latin ke Inggris dengan membawa kabar gembira, bahwa dirinya mendapat sebidang tanah yang sangat luas dari penguasa lokal dan telah menjadikan tanah itu sebuah negara, lengkap dengan pemerintahan fungsional, infrastruktur sipil menyeluruh dan kebudayaan yang hidup; Negara Poyais.

Dia menawarkan orang-orang untuk pindah ke sana, di mana (katanya) lahannya sangat bagus dan dapat menghasilkan panen yang berlimpah hanya dengan sedikit kerja. Untuk meyakinkan para calon korbannya, dia menerbitkan buku atas nama orang lain berisi deskripsi lengkap tentang negara delusionalnya, lengkap dengan sketsa-sketsa meyakinkan. Dia membangun koneksi dengan masyarakat kelas atas dan membangun kantor untuk negara itu di London dan Edinburgh (hlm. 121). Dia bahkan sudah mencetak uang kertas atas nama Bank of Poyais serta beberapa sertifikat tanah untuk dijual. Sebuah investasi bodong lainnya, namun dalam skala yang jauh lebih besar dan benar-benar direncanakan dengan serius.

MacGregor masuk pada momen yang tepat, yaitu ketika investasi-investasi yang berkaitan dengan Dunia Baru sedang booming. Tak kurang dari 250 orang termakan bujuk rayunya dan benar-benar berangkat ke Amerika Latin dengan harapan mereka bisa mendapat penghidupan yang lebih baik. Karena tidak ada yang naman-ya Negara Poyais, maka pada akhirn-

ya mereka hanya mendapati tanah kosong yang masih liar. Naasnya, bukan sadar sudah tertipu, mereka justru berpikiran bahwa mereka telah berlabuh di tempat yang salah, menyalahkan pemandu mereka, mencoba bertahan dan menjelajah ke pedalaman. Hasilnya tentu saja nihil. Kekurangan perbekalan membuat koloni kecil itu sulit bertahan hidup di sana. Pada akhirnya, hanya separuh yang berhasil kembali ke Inggris dengan selamat untuk menggugat MacGregor.

Riak dari penipuan ini sangat besar. Ia membuat orang-orang kehilangan kepercayaan pada segala macam investasi yang berkaitan dengan Amerika Latin. Gelembung investasi Amerika Latin meledak dan pasar saham London hancur sampai-sampai Bank of England harus diselamatkan oleh Prancis.

Kisah penipuan selanjutnya berasal dari tanah yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat, dilakukan oleh tokoh yang terkenal sebagai sosok jenius, negarawan serta ilmuwan, bernama Benjamin Franklin. Dia rupanya adalah seorang pembuat hoaks ulung.

Franklin mendirikan percetakan dan sedang mengembangkan surat kabar Pennsylvania Gazette ketika berusia dua puluhan. Namun media cetak yang berpotensi untung besar waktu itu adalah almanak, sebuah katalog yang terbit tahunan berisi ramalan cuaca untuk tahun mendatang. Bagi komunitas perkebunan, meng-

Tom Phillips

Penulis Buku Truth: Sebuah Sejarah Singkat tentang Omong Kosong



etahui kapan matahari akan terbit dan terbenam, laut akan pasang dan surut, kapan musim akan berganti sangatlah penting. Oleh karena itu, Franklin pun mencetak almanak atas nama Poor Richard (Richard Si Miskin), sebuah nama pena untuk tokoh fiktif Richard Saunders yang miskin dan dipaksa istrinya untuk menekuni bisnis almanak.

Masalahnya, di kota tempat Franklin tinggal sudah ada almanak Titan Leeds yang jauh lebih populer. Franklin pun membuat hoaks. Melalui nama Poor Richard, dia menerbitkan satu edisi almanak yang memuat ramalan kematian Titan Leeds. Leeds tentu saja geram ketika membaca edisi tersebut, dia juga tidak mati pada tanggal yang diramalkan dan masih terus hidup sampai beberapa tahun kemudian. Dia menyangkal ramalan kematiannya dan menyerang almanak Poor Richard dengan serangkaian tuduhan pembohong melalui almanaknya sendiri yang terbit tahun berikutnya. Namun ini sesungguhnya adalah rencana Franklin. Poor Richard membalas, pada edisi tahun berikutnya lagi, dengan menyatakan keterkejutannya ketika membaca al-

manak Titan Leeds yang dipenuhi dengan tuduhan buruk tentangnya. Hal itu justru menguatkan ramalannya bahwa Titan Leeds benar-benar telah mati dan digantikan oleh orang lain yang berperangai buruk.

Pertengkaran tersebut berlangsung lambat karena periode terbit almanak, dan masih berlangsung sampai beberapa tahun berikutnya sampai Leeds benar-benar meninggal. Namun efeknya sangat menguntungkan Franklin, almanak Poor Richard menjadi sangat terkenal dan dia meraup untuk banyak. Sementara ketenaran almanak Titan Leeds surut drastis dan terpaksa menghentikan penerbitan satu dasawarsa kemudian (hlm. 35).

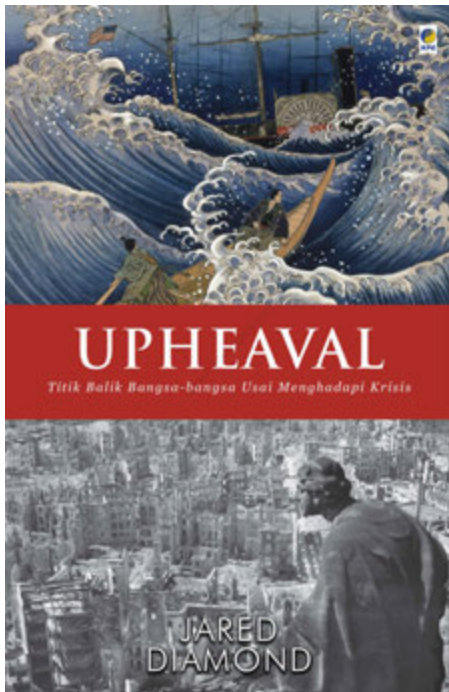
Maka, setelah menyusun serangkaian penipuan besar yang terjadi di sepanjang sejarah, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada yang namanya Era Kebenaran. Kebenaran sangat susah diupayakan karena ia punya banyak musuh. Lawan dari kebenaran bukan hanya kebohongan. Kebohongan itu sendiri terbagi-bagi ke dalam banyak kategori. Dua di antaranya kita kenal dengan baik, yaitu kebohongan “hi-

tam” (kebohongan yang merugikan orang lain) dan kebohongan “putih” (perbuatan bohong demi kebaikan). Ada juga kebohongan “kuning”, yaitu musibah fiktif yang digunakan untuk menutupi kegagalan semisal: “Laptop saya tiba-tiba rusak, jadi saya tidak bisa menyelesaikan laporan tepat waktu”. Kebohongan “biru”, sebuah kebohongan yang digunakan untuk merendahkan pencapaian karena kerendahan hati, “Ah, bukan saya yang sangat hebat karena keberhasilan ini, ada banyak orang yang membantu saya.”

Akan tetapi, kendati kebenaran memang sulit diupayakan, penulis memotivasi kita untuk tidak menyerah dalam menjunjungnya tinggi-tinggi. Kebohongan sangat mungkin muncul karena ego. Meski pada awalnya kita berkomitmen pada diri sendiri untuk bersikap obyektif, namun perangkat ego ini dapat membuat kita menginginkan sesuatu yang salah menjadi benar. Berlaku kritislah, tidak hanya pada berita-berita yang Anda terima, tapi juga pada diri Anda sendiri.



KESEJAJARAN INDIVIDU DAN KRISIS KENEGARAAN



Judul buku: *Upheaval: Titik Balik Bangsa-bangsa Usai Menghadapi Krisis*

Penulis: Jared Diamond

Penerjemah: Damaring Tyas

Wulandari Palar

Penerbit: KPG

Tahun Terbit & Cetakan: Agustus 2022

Jumlah halaman:

x + 469 halaman

ISBN: 978-602-481-849-4

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Krisis diartikan sebagai sebuah momen singkat di mana ketika momen tersebut berlalu keadaan antara sebelum dan sesudahnya menjadi jauh berbeda. Jadi, krisis adalah titik balik yang menjadi perubahan menentukan bagi alur suatu peristiwa. Ketika krisis tidak ditangani dengan benar, ia bisa membesar dan memperparah akibat yang mungkin terjadi.

Terdapat dua belas faktor yang memengaruhi apakah subjek yang tengah mengalami krisis bisa terentaskan darinya. Pertama, pengakuan bahwa dirinya berada dalam krisis. Seseorang harus sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sebuah masalah. Tanpa pengakuan semacam itu, jalan keluar tidak mungkin didapat. Kedua, menerima tanggungjawab untuk melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut. Dalam menghadapi krisis, seseorang harus membuat keputusan dan sadar penuh akan tanggungjawabnya terhadap keputusan tersebut. Krisis tidak akan hilang dengan melempar tanggungjawab.

Ketiga, pendirian pagar di sekeliling masalah yang tengah dihadapi (hlm. 38). Seseorang yang berada dalam krisis biasanya cenderung berpikir bahwa segala-galanya telah salah dan hidupnya akan berakhir. Identifikasi yang berlebihan seperti ini akan memperparah masalah tersebut. Sehingga dia perlu melihat kenyataan bahwa masalah itu hanya melingkupi satu bidang kehidupan yang terbatas dan san-

gat mungkin untuk diselesaikan, sementara di luar bidang itu segalanya baik-baik saja.

Keempat, memanfaatkan bantuan dari pihak lain dengan sebaik-baiknya. Bantuan itu tidak harus berupa sumbangan material, tapi bisa berupa saran, sudut pandang baru untuk melihat kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang sebelumnya tidak terlihat, dan sebagainya. Kelima, seseorang dapat menjadikan orang lain yang pernah mengalami masalah serupa dan berhasil menghadapinya sebagai model. Bisa jadi cara yang sama juga masih bisa digunakan. Orang lain itu tidak harus orang yang dikenal, melainkan bisa juga tokoh-tokoh inspiratif (hlm. 39).

Keenam, seseorang harus memanfaatkan kekuatan ego. Yakni rasa percaya diri untuk menyelesaikan masalah, menerima diri apa adanya dan memiliki tujuan. Mampunya kekuatan ego yang besar dalam hal ini berarti menjadi mandiri dan mampu mentolerir emosi yang kuat, tetap fokus di bawah tekanan, mengekspresikan diri secara bebas, memahami kenyataan dengan akurat, dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Ketujuh, seseorang harus dapat menilai diri dengan jujur, melihat potensi menonjol dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Terkadang, seseorang melebih-lebihkan kemampuannya di satu bidang dan terlalu meremehkan dirinya dalam bidang lain. Menyadari ini dengan baik akan membuat seseorang mampu membuat keputusan

dengan lebih tepat dalam menanggapi krisis.

Kedelapan, belajar dari pengalaman sebelumnya. Jika seseorang telah mengalami krisis serupa atau bahkan lebih besar dan dapat keluar dengan selamat, maka itu akan memberinya rasa percaya diri dalam menghadapi krisis lain di masa mendatang. Kesembilan, sabar yang diartikan sebagai kemampuan untuk mentolerir ketidakpastian, ambiguitas, atau kegagalan untuk berubah pada awalnya. Kesabaran juga termasuk keluar dari zona nyaman yang diinginkan ke zona baru yang penuh tantangan namun diperlukan untuk menanggulangi krisis.

Kesepuluh, fleksibilitas atau kelenturan dalam memandang masalah. Kekakuan sebagai lawan dari fleksibilitas berarti berkeyakinan bahwa hanya ada satu jalan, ini bisa menjadi hambatan bahkan sumber kegagalan dalam mengeksplorasi cara-cara lain guna menanggulangi krisis. Fleksibilitas jauh lebih menguntungkan daripada kekakuan karena tidak selamanya suatu cara tertentu akan terus tepat sasaran.

Kesebelas, mempertahankan nilai inti dan mengadaptasikan sisanya. Krisis biasanya dapat ditanggulangi dengan keluar dari zona nyaman, dengan kata lain melalui perubahan. Namun seseorang juga biasanya mempunyai nilai-nilai yang tidak akan dia ubah apa pun keadaannya. Nilai-nilai ini disebut nilai-nilai inti, yang bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Misalnya, agama dan negara. Seseorang bisa menjadikan keduanya sebagai nilai inti; apa pun krisis yang melanda dia tidak akan pindah agama atau pindah kewarganegaraan. Mengidentifikasi nilai-nilai inti ini perlu, karena kerancuannya dengan nilai-nilai yang dapat dinegosiasikan akan menjadi hambatan dalam menerima perubahan, atau dengan kata lain, menanggulangi krisis.

Terakhir, kebebasan untuk memilih dan berubah. Misalnya, seseorang yang masih lajang akan mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam bereksperimen dengan arah karirnya dibanding orang yang sudah berkeluarga. Bujangan tidak terbebani oleh tanggungjawab-tanggungjawab seperti biaya anak sebagaimana seorang kepala keluarga. Ini menjadikannya lebih fleksibel.

Baik individu maupun negara dapat mengalami krisis. Faktor-faktor yang menentukan kemampuan untuk menanggulangi krisis juga dapat diterapkan pada negara. Penulis mengulas kesejajaran semacam itu dengan bahasa yang lugas dan menarik. Dalam buku ini disajikan tujuh negara yang telah atau sedang mengalami krisis tertentu berdasarkan pengamatan pribadi penulis. Ketujuh negara itu adalah Finlandia, Jepang, Chili, Indonesia, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat. Pemilihan negara-negara

tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi, yakni sebagai tempat-tempat di mana penulis pernah tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama.

Untuk kasus Indonesia, krisis yang disorot adalah seputar upaya pemberontakan PKI, peristiwa-peristiwa yang melatarinya serta dampak-dampak historisnya terhadap negara tersebut. Indonesia baru berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat pada 1945 dengan Ir. Sukarno sebagai presiden pertamanya. Namun masalah-masalah masih banyak, Belanda dan negara-negara penjajah lain masih ingin berkuasa. Beberapa perang dengan mereka masih terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Papua, yang semula enggan diserahkan oleh Belanda, akhirnya juga bergabung ke Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Sukarno jelas memainkan peran yang sangat penting, namun penulis juga mengungkapkan kritiknya terhadap presiden pertama itu. Sukarno digambarkan sebagai sosok yang menganggap dirinya mampu menafirkan keinginan tak sadar rakyat dan bertindak sesuai egonya sendiri karena anggapan tersebut. Dia tampil ke panggung dunia untuk menyuarakan anti-kolonialisme, mencetuskan “demokrasi terpimpin” dan membiarkan dirinya diangkat sebagai presiden seumur hidup. Sukarno berhasil merebut Papua, namun dengan membawa banyak korban dan mengabaikan keinginan rakyat Papua sendiri untuk merdeka.

Pasca upaya kudeta yang gagal oleh PKI pada tahun 1965, Sukarno digantikan oleh Suharto. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, dan mengeksekusi setengah juta orang, presiden kedua ini lebih memusatkan tenaganya pada permasalahan-permasalahan domestik. Suharto di kemudian hari juga terkenal dengan budaya korup dan kediktatorannya yang mengakar. Namun penulis juga memotivasi pembaca untuk menilai dengan jujur. Suharto-lah yang mencetuskan program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk (pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dan tidak diimbangi dengan perkembangan SDM yang memadai adalah masalah serius bagi suatu negara). Rezim Suharto jugalah yang memprakarsai revolusi hijau, yakni penyediaan pupuk, peningkatan kualitas benih, dan pembangunan infrastruktur pertanian secara besar-besaran, yang kesemuanya meningkatkan produktivitas dan memperbaiki nutrisi orang Indonesia secara keseluruhan.

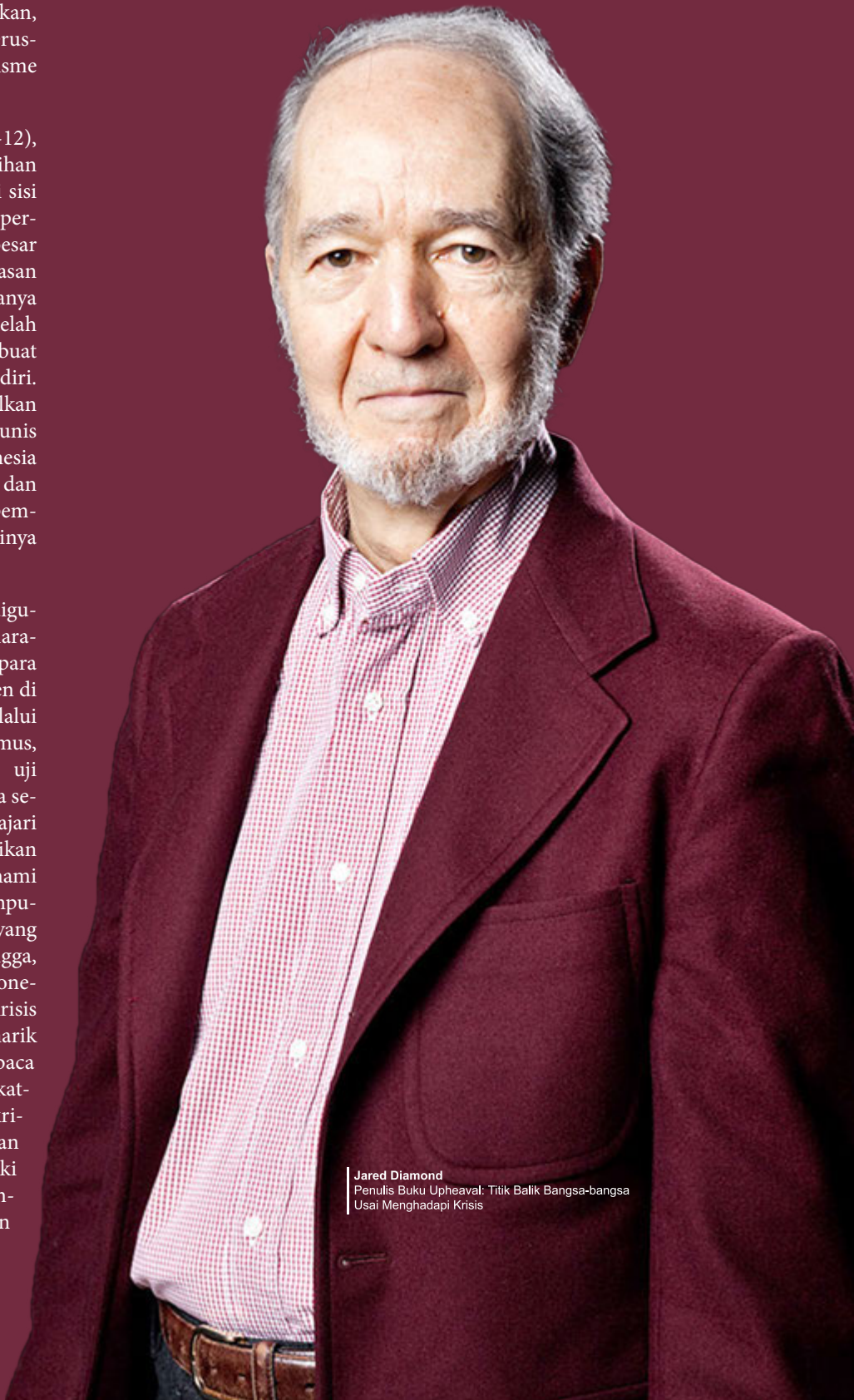
Tidak semua faktor yang telah disebutkan di atas menonjol dalam penanggulangan krisis yang dialami Bangsa Indonesia ini. Misalnya, Suharto mengadopsi perubahan selektif dan membangun pagar di sekitar masalah ekonomi domestik (Faktor ke-3). Berbeda dari Sukarno

yang anti-Barat, Suharto justru merangkul para ekonom terlatih Barat untuk menanggulangi resesi ekonomi. Sementara itu, meskipun integritas nasional, pemerintahan non-komunis, dan toleransi beragama yang besar dipertahankan, meskipun Suharto tidak meneruskan kampanye anti-imperialisme yang berapi-api Sukarno.

Terkait kebebasan (Faktor ke-12), Indonesia mempunyai kelebihan di satu sisi dan kekurangan di sisi lain. Kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk yang besar menjadi kendala bagi kebebasan tersebut, sementara tidak adanya serangan dari negara lain setelah Agresi Militer Belanda membuat Indonesia bisa membenahi diri. Setelah Suharto meninggalkan seluruh kebijakan pro-Komunis dan merangkul Barat, Indonesia menerima banyak investasi dan bantuan asing dalam upaya pembangunan kembali ekonominya (Faktor ke-4).

Adapun gaya penyajian yang digunakan dalam buku ini adalah naratif, yakni gaya “tradisional” para ahli sejarah. Argumen-argumen di dalamnya dikembangkan melalui penalaran prosa, tanpa rumus, tabel angka, grafik, ataupun uji statistik signifikansi, dan hanya sejumlah kecil kasus yang dipelajari (hlm. 12). Gaya ini menjadikan Upheaval sangat mudah dipahami dan dicerna tanpa harus mempunyai latar belakang akademik yang kuat terlebih dahulu. Sehingga, tidak hanya bab tentang Indonesia, bab-bab yang mengulas krisis negara lain juga menjadi menarik untuk dibaca. Selain itu, membaca Upheaval juga dapat meningkatkan wawasan kita terhadap krisis negara-negara tersebut dan barangkali bisa memperbaiki sudut pandang dalam memandang negara kita sendiri. Selain

itu, kedua belas faktor yang telah disebutkan juga dapat kita gunakan untuk menanggulangi krisis dalam skala yang jauh lebih kecil seperti krisis personal.



Jared Diamond
Penulis Buku Upheaval: Titik Balik Bangsa-bangsa
Usai Menghadapi Krisis

BERBALAS KEJAM

Film Berbalas Kejam menjadi satu dari sekian banyak film yang dibintangi Reza Rahardian. Namun, film ini sedikit berbeda dibanding film Reza lainnya karena bergenre thriller. Meski baru pertama kali menjadi tokoh utama dalam film thriller, namun kemampuan Reza sebagai aktor kenamaan tanah air tak dapat diragukan lagi.

Disutradarai oleh Teddy Soeriatmadja film ini dibintangi oleh sederet artis populer lainnya mulai dari Baim Wong, Laura Basuki, Kiki Narendra, Haydar Salishz, Yoga Pratama, Irgi Fahrezi, hingga Niken Anjani.

Film yang diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment dan Karuna Picture ini mengisahkan seorang arsitek bernama Adam yang diperankan Reza Rahardian. Adam sangat terobsesi untuk balas dendam atas kejadian traumatis di masa lalu yang merenggut nyawa istri dan anaknya.

Tepat di hari ulang tahunnya, rumahnya diketuk oleh tiga orang tak dikenal. Awalnya Reza dan istrinya tak menaruh curiga, mereka berpikiran ketukan pintu tersebut datang dari kurir pengantar makanan. Namun nahas sekali, bukan kurir yang Adam dapati tetapi segerombolan perampok yang memaksa masuk rumahnya hingga membunuh istri dan anaknya. Sementara itu, Adam yang menyaksikan anak dan istrinya dibunuh tak bisa melakukan apapun karena tangan dan kakinya diikat oleh para perampok.

Sejak saat itu, Adam menjalani kehidupan dengan perasaan penuh ketakutan, marah, merasa bersalah sekaligus putus asa secara bersamaan. Kompleksnya emosi tersebut mampu dihadirkan Reza dengan sangat nyata. Sehingga saat menontonnya sulit bagi siapapun untuk tak ikut meringis melihat getirnya kehidupan Adam.





Ilustrasi Google



Barangkali satu hal bisa kita sepakati bersama dalam film ini adalah trauma tidak pernah menjadi kondisi yang mudah untuk mereka yang mengalaminya. Butuh proses yang panjang bagi seseorang untuk menerima masa lalunya yang buruk. Kendati demikian, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menerima masa lalunya. Meski kadang cara yang ditempuh terlalu beresiko.

Balas Dendam adalah Insting Dasar Manusia

Obsesi Adam untuk balas dendam pada ketiga perampok itu menjadi hal yang ia pikirkan setiap hari. Berbicara mengenai balas dendam, secara psikologis merupakan insting dasar manusia agar orang lain bisa merasakan hal yang sama dengan yang dirasakannya. Sementara itu, para peneliti mengungkapkan dendam seringkali menjadi bentuk perlindungan dan proses mencari keadilan bagi seseorang.

Rasa trauma yang Adam alami membuat kehidupannya terpuruk. Dia sering kali tak bisa fokus menjalani kehidupannya sehari-hari. Rasa trauma itu juga bahkan mengganggu pekerjaannya sebagai arsitek. Ia kerap melamun saat sedang bekerja. Kondisi tersebut membuat sahabat sekaligus atasannya di kantor merasa khawatir. Tokoh Kian yang diperankan oleh Irgi Fahrezi menyarankan Adam untuk bertemu psikolog agar bisa mendapatkan solusi atas masalahnya. Namun, sebagaimana seseorang yang mengalami trauma, Adam tentu saja menolak. Ia menyangkal semua kondisinya dan mengatakan ia baik-baik saja.

Meski pada akhirnya Adam memutuskan untuk pergi menemui psikolog yang disarankan oleh sahabatnya, namun alasannya bukan karena ia menyadari kondisi psikisnya yang

membutuhkan bantuan. Tetapi karena ia ingin mendapatkan pekerjaannya kembali. Psikolog itu bernama Amanda yang diperankan oleh Laura Basuki.

Dalam sesi konselingnya, Amanda menyarankan Adam untuk berdamai dengan masa lalunya agar ia bisa menjalani hidupnya kembali. Tentu saja Adam tidak sepakat. Baginya, ia baru bisa berdamai atau menerima masa lalunya apabila ketiga perampok tersebut juga merasakan hal yang sama dengannya.

Dalam sesi konseling pertamanya, Adam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi anak dan istrinya. Ia kerap merasa tidak berguna saat mengingat kejadian nahas yang menimpa keluarganya. Sebab saat itu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Adam juga enggan terbuka dengan Amanda mengenai traumanya, karena semakin ia bercerita pada orang lain, semakin trauma itu kembali menyerangnya seolah-olah peristiwa itu terulang setiap hari. Meski sudah dua tahun berlalu, semua detail kejadian masih lekat pada ingatan Adam.

“Kalau kamu punya trauma itu bukan salahmu, tapi menghadapi dan mengatasi trauma itu tanggung jawab kamu,” kata Amanda. Kalimat tersebut mengakhiri sesi pertama konseling Adam yang mulai tertohok dengan pernyataan sang psikolog.

Bergulat dengan Keputusan

Beberapa orang mungkin percaya bahwa dengan balas dendam, semua emosi bisa terlampiaskan dan perasaan



akan menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, dampak balas dendam justru sebaliknya, tidak menyelesaikan masalah tetapi menciptakan masalah yang baru.

Setelah membunuh dua orang yang menjadi targetnya, Adam tersenyum puas di depan kaca. Meskipun itu bukanlah senyum kebahagiaan, sebab dalam adegan lainnya Adam banyak menunjukkan sisi frustrasi, amarah, dan dirinya yang penuh keputusan. Pada kenyataannya, amarah dan rasa frustrasi itu tak benar-benar berkurang bahkan ketika ia berhasil membunuh target dengan cara yang lebih kejam.

Dalam film ini, kita bisa menyaksikan sisi lain Reza Rahardian yang biasanya memerankan sosok protagonis. Namun dalam “Berbalas Kejam” ia tampil bengis tanpa ampun pada targetnya. Wajar demikian, tak pernah mudah bagi siapapun untuk menerima dengan ikhlas ketika orang tersayang dibunuh di depan mata.

Walau demikian, setelah menghabiskan kedua targetnya, Adam memutuskan untuk menjalani kehidupannya kembali. Ia pergi ke supermarket berbelanja makanan sehat, merapikan rumah, kembali bekerja dengan produktif, bahkan berkenan dengan Amanda psikolog yang ia temui.

Tanpa disangka, melalui Amanda ia bertemu dengan pelaku lainnya yang ternyata kakak kandung dari Amanda yakni Kardi yang diperankan oleh Baim Wong. Emosinya memuncak karena pelaku tersebut tak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah meskipun ia adalah dalang di balik perampokan di rumah Adam dua tahun silam.

Kardi justru merasa dirinya yang difitnah sebagai pembunuh. Hal tersebut menyulut emosi Adam untuk kembali merencanakan pembunuhan. Amanda yang mulai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait pembunuhan yang dilakukan Adam mulai menyadari bahwa kakaknya akan menjadi target balas dendam Adam selanjutnya.

Adegan baku hantam antara Adam dan Kardi membawa penonton berada dalam situasi mencekam, terlebih ketika Adam mulai merasa bingung untuk menuntaskan balas dendamnya atau menyudahinya. Mengingat di tengah kebengisannya menghajar Kardi ia melihat sosok istri dan anak Kardi yang bingung dan ketakutan, seketika itu juga ia teringat anak dan istrinya.

Terlepas dari adegan laga dan tatapan kosong frustrasi yang dijumpai hampir sepanjang durasi film ini, “Berbalas Kejam” patut diapresiasi sebagai salah satu film laga yang menarik untuk ditonton.

Film ini semakin memperkaya sederet judul film laga lainnya di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kekuatan dendam seperti film “Serigala Terakhir” (2009), “The Professionals” (2016), dan “I will, Survive” (2021). Banyak pengamat film percaya, selain cinta, dendam mungkin adalah tema besar yang sering diangkat dalam film. Dendam juga menjadi katalisator ampuh yang tidak lekang di zaman.

• **Novi**

Marsam

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Namanya Karsam, atau Warsam. Atau mungkin juga Marsam,” kata Syukur pada Ridho yang sedang duduk di depannya terpisah oleh meja. Sambil membuka pembicaraan tangannya mencomot sepotong pisang goreng yang masih hangat untuk dilahap sebagai pencuci mulut. Dari samping kasir, musik-musik keroncong mengalun merdu.

Sementara itu, yang diajak bicara tidak begitu memperhatikan. Mata Ridho lebih banyak tertuju pada layar smartphone sambil sesekali memenceti layarnya dengan jemari yang berlarian cepat. Sesekali, tangannya mencubit ujung sendok, memutar-mutarnya dari pangkal supaya kopinya teraduk, lalu membiarkan kopi itu mengenap lagi tanpa sempat terminum.

“Siapa?” tanya Ridho tanpa memandang wajah Syukur. Matanya masih terpaku pada layar smartphone.

Syukur tidak tersinggung dengan sikap acuh tak acuh itu. Dia tahu betul bisnis yang tengah dibangun Ridho telah menyandera sebagian besar waktunya. Ridho tidak melakukan itu hanya acuh tak acuh kepadanya, melainkan pada semua teman yang pernah makan siang bersamanya. Istri Ridho bahkan sesekali pernah mengeluhkan suaminya yang tidak punya banyak waktu luang untuk keluarga. Orang seperti dia memang punya banyak mitra, yang kesemuanya menuntut peyalaan ekstra. Tidak heran.

“Mari kita sebut saja Marsam. Tunawisma yang belakangan ini sering terlihat di sekitar kompleks C IV.”

“Oh, dia. Beberapa kali aku mendengar tentangnya dari tetangga, juga istriku. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Terkadang orang itu hanya berjalan-jalan seolah tidak punya tujuan. Kadang dia juga berdiri di depan sebuah rumah kosong lama sekali sampai orang-orang berpikir dia akan mencuri. Tapi begitu didatangi satpam, dia akan menjelaskan dengan sopan bahwa kedatangannya ke sekitar sana hanya untuk meminta sedekah uang

atau makanan, bukan untuk melakukan kejahatan.”

“Itu benar,” Syukur mengiyakan. “Tapi apa istrimu juga sudah bercerita? Kemarin Si Marsam ini berdiri di depan rumahmu lama. Setelah istrimu memberikan sedekah untuknya, dia masih saja berdiri di sana. Istrimu sampai takut keluar lagi. Dia mengunci pintu rapat-rapat.”

Ridho masih tidak melihat Syukur. Jemarinya semakin gencar berkelieran memenceti layar smartphone. Alisnya terangkat dan raut wajahnya berubah sedikit kesal. Mungkin dia sedang menerima balasan dari mitra yang rewel. “Belum. Mana sempat? Semalam aku pulang larut karena meeting dadakan dengan klien dari luar negeri. Istri dan anak-anakku sudah tidur. Pagi tadi aku sudah berangkat sebelum mereka bangun.”

Setelah menelan potong terakhir pisang goreng yang baru saja digitnya, Syukur pun melanjutkan cerita. “Waktu itu aku sudah di rumah. Aku mau pergi ke alun-alun untuk bermain layang-layang, menikmati sore yang cerah bersama istri dan anakku. Tiba-tiba istrimu menelfon dan meminta tolong padaku untuk mengusir Marsam.”

“Lantas?”

“Aku langsung keluar. Marsam masih ada di sana. Rumah kita berimpit, jadi nyaris secepat kilat aku sudah berada di sampingnya. Kutegur dan kuperingati dia bahwa tindakannya mencurigakan. Jika kulihat dia sekali lagi melakukan itu, aku tidak akan segan untuk menyeretnya ke kantor polisi.”

Ridho sama sekali tidak tertarik dengan pembicaraan ini. Desahnya sudah terdengar dan Syukur paham akan hal itu. Namun dia terus saja bercerita, sebab ada yang ingin dia sampaikan ke tetangga sekaligus sahabatnya itu.

“Tapi lalu dia memandangku dengan penuh hormat. Jauh di luar dugaan, dia kemudian mengatakan bahwa dirinya kenal



baik dengan Tuhan. Dia berdiri di sana karena Tuhan.”

Kebosanan yang menempel di wajah Ridho belum tanggal. Namun kali ini dia berpaling pada Syukur dan berusaha mendengarkan kata-katanya. Dia melakukan itu lebih karena menghargai Syukur sebagai sahabatnya saja, bukan karena tertarik pada apa yang mereka bicarakan. Toh mitra-mitran-nya bukan pihak-pihak yang tidak bisa ditinggal brang sejenak. “Oh, kalau itu aku juga tahu. Kata tetangga seberang rumah, dia memang suka mengatakan hal-hal semacam itu. Punya kedekatan khusus dengan Tuhan, hamba yang diajak bicara oleh Tuhan, mengenal baik Tuhan atau semacamnya. Mungkin dia pikir dirinya nabi. Di zaman yang sudah gila seperti ini, orang-orang seperti itu memang banyak bermunculan.”

“Nabi? Tidak, tidak. Dia tidak pernah menggunakan kata itu. Justru dia menyangkal dirinya spesial. Dia sendiri pun kebingungan, kenapa Tuhan memilih dia untuk diajak berkomunikasi.”

“Wah, sudah jadi warsamolog kamu?” Ridho menyindir, Syukur menyengir.

“Omong-omong, apa dia pernah menyebutkan, Tuhan dari agama mana yang mengajaknya bicara itu?”

Syukur menggeleng.

“Nah, kalau begitu sudah pasti dia sesat!” Simpul Ridho cepat. “Kalau bukan pemeluk salah satu dari agama-agama yang diakui maka Tuhannya itu sudah pasti bukan ‘Tuhan’, melainkan Tuhan palsu. Atau bahkan sangat mungkin dia hanya berbohong saja untuk mencari sensasi.”

“Aku ingin setuju denganmu. Awalnya, kukira juga begitu. Tapi kemudian dia mengatakan padaku kenapa dia berdiri agak lama di depan rumahmu. Katanya, ‘Saya hanya ingin menyarankan pada penghuni rumah ini, supaya besok yang bersangkutan menjauhi jalan raya. Tuhan berkata pada saya, penghuni rumah ini punya banyak dosa. Tuhan akan membuat perhitungan dengan penghuni rumah ini besok setelah terdengar bunyi petir dua kali. Lalu kata-kata-Nya tidak begitu jelas, seperti dengungan. Tapi saya dengar dengan jelas ada kata ‘Truk’ di situ. Dalam penafsiran saya, penghuni rumah ini akan ditabrak truk besok, setelah terdengar bunyi petir dua kali berturut-turut.’ Aku menjadi cemas setelah itu. begitu ada kesempatan aku segera menemuimu di sini. Sekalian makan siang bersama tentunya.”

Udara melembab pelan-pelan.

“Ah! Itu hanya omong kosong. Sekarang memang sudah musim hujan, tapi lihat langit di luar sana terang benderang. Segumpal awan pun tidak ada. Bagaimana mungkin ada dua suara petir berturut-turut? Lagipula kau tahu aku. Sesibuk

apa pun kegiatanku, aku tidak pernah meninggalkan ibadah pada Tuhanku. Bagaimana mungkin aku disebut banyak dosa? Marsam itu sudah jelas meracau.”

Sebaris pesan yang muncul di layar smartphone Ridho mendadak membuatnya terkejut. Dia meminum kopinya yang sudah dingin dalam beberapa tegukan memburu. Lalu dia bangkit. “Sudah ya. Klienku tiba-tiba minta meeting dadakan. Dalam setengah jam aku harus ada di lokasi.”

“Tapi Dho...”

“Sudahlah. Kau tidak usah khawatir. Marsam itu penipu, Tuhannya palsu. Percayai itu saja supaya kamu lebih tenang.”

Ridho menyambar tas kulitnya yang berisi berkas-berkas penting. Dia membalik badan dan tidak menoleh lagi. Blazer biru menghilang bersamanya ke balik pintu.

Tidak seperti Ridho, Syukur adalah karyawan yang punya jam kerja pasti. Tidak ada yang namanya meeting dadakan. Dia juga jarang bekerja lembur karena tidak merasa begitu butuh tambahan penghasilan. Ketika dia melihat pergelangan tangannya, masih ada banyak waktu tersisa sampai jam makan siang habis. Dia pun memesan pisang goreng lagi, untuk dinikmati dengan secangkir kopi sambil mendengarkan musik keroncong.

Beberapa menit berlalu dan kelembaban sudah mencapai puncaknya. Sekarang, Syukur merasa gerah. Ketika porsi kedua pisang gorengnya datang, dia membuka kancing teratas bajunya supaya dadanya terasa lebih sejuk. Sayang kelembaban udara menyegah keringatnya menguap begitu saja.

Awan pekat merayap dengan cepat di langit. Sejenak lalu terang benderang, sekarang tiba-tiba gelap gulita. Bola-bola air sebesar kerikil mulai menumbuki atap dengan gencar. Dua kali terdengar bunyi petir menyambar. Deg!

“Ridho!” seru Syukur dalam hati. Cepat-cepat dia membuka tas dan mengeluarkan smartphone. Dia terlalu terburu sampai-sampai benda itu lolos dari tangannya. Syukur membungkuk di kolong meja dengan tangan meraba-raba. Begitu dapat, jemarinya langsung menjentiki layar. Dia berusaha menelfon Ridho. Panggilan itu sampai padanya, sebab “berdering” muncul di layar. Tapi Ridho tidak mengangkat. Syukur mengulangi panggilannya sekali lagi. Sama. Diulangi lagi dan sama saja. Ridho tidak mengangkat telfonnya.

Syukur semakin cemas. Tapi dia juga sadar, menerka-nerka dengan prasangka buruk tidak akan membuahkan apa pun kecuali kekhawatiran yang semakin besar. Dia teringat kata-kata Ridho tadi dan berusaha untuk mengulangnya sebanyak mungkin dengan harapan batinnya menjadi tenang. “Karena bukan Tuhan dari salah satu agama yang diakui,

maka Tuhannya Marsam itu pasti Tuhan palsu... Karena bukan Tuhan dari salah satu agama yang diakui, maka Tuhannya Marsam itu pasti Tuhan palsu... Karena bukan Tuhan dari salah satu agama yang diakui, maka Tuhannya Marsam itu pasti Tuhan palsu...”

Benar. Pada akhirnya, siapalah Marsam? Mengaku-aku mengenal Tuhan. Mereka yang rajin beribadah bertahun-tahun saja belum tentu diizinkan untuk mengenal-Nya.

Tiba-tiba smartphone Syukur berdering. Panggilan dari Ridho. Dia pun membatin, “Nah, benar kan? Ridho menelfon balik. Itu artinya dia tidak apa-apa. Petir tadi hanya kebetulan saja dan Marsam tidak bisa dipercaya.”

“Maaf, apa bapak keluarga dari pemilik HP ini?” tanya suara dari seberang. Suara orang asing yang jelas-jelas bukan Ridho.

“Bukan, saya temannya. Heh!? Anda siapa!? Kenapa HP teman saya ada di Anda!?”

“Tenang, Pak. Maaf. Saya hanya orang yang kebetulan ada di lokasi. Orang yang punya HP ini mengalami kecelakaan. Mobilnya ditabrak truk pengangkut pasir dari arah samping. Saya sudah menelfon rumah sakit terdekat dan mereka sedang mengirim ambulans ke sini...”

Deg!

“Lokasinya di mana!?” Syukur memotong.



CALL FOR 'PAPER

JURNAL BINA PRAJA

Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.



JBP Journal of Home Affairs Governance

Its central aim is thereby to enhance the broad scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations, communities, societies and individuals, at international, regional, national, local, and village levels.

April, Agustus & Desember

TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscript may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscript should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscript have not been published in other media
- Manuscript should have a minimum of 35000-38000 character in Indonesian or English
- For the writing systematic and format, see <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/authorGuidelines>
- A minimum of 25 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduated theses, and/or other research report
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.



jurnal.kemendagri.go.id

For more details | 08812 1941 9885/redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:



call for PAPER MATRA PEMBARUAN



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2023, yang akan diterbitkan pada 2 (dua) edisi yaitu Mei dan November.

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>
Jalan Kramat Raya No.132, Senen, Jakarta Pusat
0812 8165 6781/Shinta (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com



- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38000 s.d 40000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah Dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan
- Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.
- Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).
- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*).

Google Scholar

GARUDA

MORAREF

Crossref

neliti